Temuan Indeks Gender SDG 2024

Masa depan yang setara gender dalam krisis?

EQUAL MEASURES 2030

Isi

2 Ringkasan eksekutif

8 Masa depan yang (tidak) setara?
Kesetaraan gender di dunia yang penuh krisis

10 Indeks Gender SDG 2024: gambaran besarnya

12 Dengan hanya enam tahun tersisa hingga tahun 2030,
tidak ada negara yang mencapai kesetaraan gender

17 Berdasarkan tren saat ini, dunia tidak akan mencapai
kesetaraan gender dalam waktu hampir satu abad

22 Akankah dunia menjadi kurang setara pada tahun 2030 dibandingkan pada tahun 2015?

24 Skenario 'penurunan': kemungkinan nyata

26 Tidak meninggalkan seorang pun?

28 Masa depan dengan krisis yang saling terkait

34 Cetak biru untuk pemerintah:
memajukan kesetaraan gender dalam menghadapi krisis

42 Lampiran 1: Indikator indeks, target, dan sumber data

Pesan dari Kelompok Pengarah

DENGAN WAKTU KURANG DARI ENAM TAHUN YANG TERSISA hingga batas waktu Agenda 2030, kesetaraan gender masih merupakan janji yang belum terpenuhi. Indeks Gender SDG 2024 oleh Equal Measures 2030 memberikan pesan yang serius namun penting: tidak ada negara yang berada di jalur yang tepat untuk mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030. Pengungkapan ini bukan hanya sekedar statistik, namun sebuah seruan untuk bertindak, sebuah seruan untuk solidaritas global. dan usaha kooperatif.

Sebagai anggota Kelompok Pengarah koalisi Equal Measures 2030, kami telah menyaksikan secara langsung kekuatan kolaborasi dan dampak mendalam dari berbagai suara yang bersatu dalam tujuan. Anggota kami disatukan oleh misi bersama untuk memastikan data dan bukti mendorong advokasi. dan tindakan terhadap kesetaraan gender. Di masa krisis yang saling terkait ini, pentingnya koalisi seperti yang kita lakukan tidak dapat dilebih-lebihkan. Melalui tindakan kolektif kita, kita dapat menghilangkan hambatan sistemik yang menghambat kemajuan. Setiap anggota koalisi membawa perspektif dan keahlian yang unik, memperkaya misi bersama kita dan memperkuat suara kolektif kita.

Saat Anda mendalami temuan Indeks Gender SDG 2024, kami mendorong Anda untuk mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari pekerjaan ini. Biarkan hal ini menginspirasi Anda untuk mengambil tindakan, untuk bergabung dengan orang lain, dan untuk memperjuangkannya.

penyebab kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan. Bersama-sama, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap orang Individu, apa pun jenis kelaminnya, memiliki kesempatan untuk berkembang pada tahun 2030 dan seterusnya.

DALAM SOLIDARITAS,
Kelompok Pengarah Koalisi Equal Measures 2030

DANESSA LUNA
Direktur Eksekutif, Asociación Generando Equidad, Liderazgo y Peluang (ASOGEN)

FATOU NDIAYE TURPIN
Direktur Eksekutif,
Jaringan Siggil Jigéen (RSJ)

KRISTUS JONES BAPTIS
Direktur Eksekutif,
Data2X

NILANGI SARDESHPANDE
Pimpinan Proyek,
Masyarakat Alternatif Kesehatan (SAHAJ)

SIVANANTHI THANENTHIRAN
Direktur Eksekutif,
Sumber Daya dan Penelitian Asia-Pasifik Pusat untuk Wanita (ARROW)

ALISON PEMEGANG
Direktur Eksekutif,
Ukuran yang Sama 2030

JULISA TAMBUNAN
Wakil Direktur Eksekutif dan Kepala Kemitraan dan Pembelajaran,
Ukuran yang Sama 2030

Seorang gadis yang lahir hari ini harus menunggu sampai Ulang tahun ke 97 **– melampaui rentang hidup yang diharapkan – untuk melihat kesetaraan gender tercapai secara global.**

Tidak ada satu negara pun yang berada di jalur yang tepat untuk mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030.

Hampir 40% dari negara memiliki mandek – atau bahkan menurun – antara 2019 dan 2022

74% dari SDG target tidak akan dicapai tanpa kesetaraan gender.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2024

Indeks Jenis Kelamin:

Temuan utama

Jika tren saat ini terus berlanjut, kesetaraan gender global tidak akan tercapai hingga abad ke-22.

Meskipun skenario ini sangat menyedihkan,**bahkan lintasan itu mungkin optimis**mengingat adanya krisis yang saling terkait yang akan mendominasi enam tahun terakhir Agenda 2030.

Antara tahun 2019 dan 2022**hampir 40 persen negara**-rumah bagi lebih dari 1 miliar wanita dan anak perempuan pada tahun 2022 - mengalami stagnasi atau bahkan penurunan dalam kesetaraan gender.

Skor Indeks yang 'menurun' merupakan penyebab kekhawatiran yang serius. Kemunduran berarti bahwa**perubahan negatif telah terjadi**di sejumlah dari 56 isu dalam Indeks.

Jika tren kemunduran dan stagnasi ini terus berlanjut, perkiraan kami menunjukkan bahwa**Ketimpangan gender global mungkin akan lebih buruk pada tahun 2030 dibandingkan saat SDGs disepakati pada tahun 2015.**

Kemungkinan yang mengejutkan ini merupakan ancaman terhadap pencapaian seluruh Agenda 2030: bagaimanapun juga,hampir tiga perempat (74 persen) dari Target SDG dianggap sebagai**secara langsung atau signifikan bergantung pada kesetaraan gender.**

Sebuah masa depan

dariantar-terhubung krisis

Ukuran yang Sama 2030 (EM2030) anggota koalisi dan pejuang gender melihat **beberapa krisis yang saling terkait terkait dengan sumber daya, demokrasi, dan keselamatan serta keamanan**yang sudah berdampak negatif pada kesetaraan gender.

Krisis sumber daya

Aliran pembiayaan internasional yang tidak mencukupi dan tidak berkelanjutan serta langkah-langkah penghematan dalam negeri membuat kecil kemungkinan dana publik akan diinvestasikan dalam cara-cara yang melindungi dan memajukan kesetaraan gender.

Beban utang pemerintah(Ind. 17.2) memburuk lebih parah dibandingkan dengan 55 indikator lainnya dalam Indeks, yang berdampak pada pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan.

Pandangan perempuan tentang biaya pangan(Ind. 2.4) dan kenyamanan terhadap pendapatan rumah tangga mereka (Ind. 1.4) memburuk secara signifikan antara tahun 2019 dan 2022, dengan skor menurun di 63 persen negara untuk kedua indikator tersebut.

Krisis demokrasi

Kesetaraan gender terkait erat dengan demokrasi. Namun, fondasi demokrasi di seluruh dunia terancam karena meningkatnya ketimpangan ekonomi, polarisasi sosial dan politik, serta tertutupnya ruang sipil.

Ketimpangan pendapatan(Ind. 10.1) mengalami stagnasi atau memburuk di tiga perempat negara antara tahun 2019 dan 2022.

Skor indeks 2024mencerminkan masyarakat yang bergerak ke arah ekstrem politik seiring dengan kesenjangan yang makin lebar antara nilai-nilai yang dipegang oleh wanita dan pria.

91 negara masih memiliki skor 'buruk' dan 'sangat buruk'pada tahun 2022 untuk otonomi pribadi, hak individu, dan kebebasan dari diskriminasi (Ind. 10.2).

Krisis keamanan dan keselamatan

Konsep 'keselamatan dan keamanan' sering kali hanya dilihat melalui sudut pandang konflik kekerasan dan militerisasi, dan keduanya memang sedang meningkat. Bagi perempuan dan anak perempuan, realitas ini lebih mengutamakan tubuh, pilihan, dan keselamatan pribadi mereka.

Jumlah perempuan dan anak perempuanyang tinggal di negara-negara yang terkena dampak konflik mencapai 614 juta pada tahun 2022, 50 persen lebih tinggi dibandingkan jumlah pada tahun 2017.

Perserikatan Bangsa-Bangsamemperkirakan bahwa 80 persen orang yang mengungsi akibat perubahan iklim adalah perempuan dan anak perempuan.

Hanya sekitar setengah (57 persen) perempuan secara global menyatakan mereka merasa aman berjalan di lingkungan tempat tinggal mereka pada malam hari (Ind. 16.3).

Majukesetaraan gender dalam menghadapi krisis

Cetak biru bagi pemerintah yang menyoroti tujuh rekomendasi lintas sektor:

Halaman 01

Meningkatkan derajat wanita dan kepemimpinan, kekuatan, dan suara anak perempuan

Keterlibatan perempuan dan anak perempuan dalam kehidupan publik bukan hanya hak asasi manusia yang hakiki, tetapi juga penting bagi kesehatan sosial dan ekonomi suatu negara. Namun, norma gender tentang kepemimpinan, serta kemiskinan, beban perawatan, dan kekerasan terhadap tokoh publik perempuan, sering kali mengecualikan perempuan dan anak perempuan dari ruang pengambilan keputusan.

Halaman 02

Reformasi dan penerapan hukum kesetaraan dan kebijakan

Proses pengadopsian dan/atau reformasi undang-undang kesetaraan dapat melibatkan masyarakat sipil, pemerintah, pembuat undang-undang, dan masyarakat luas dalam perdebatan dan penetapan norma serta dapat menciptakan tekanan dan struktur untuk akuntabilitas.

Tanggal 05.

Mengenali dan merespons untuk kebutuhan unik dan tahap kehidupan gadis remaja dan wanita muda

Buktinya jelas: ketika hak-hak anak perempuan terwujud, masyarakat pun berkembang. Pengalaman dan kesempatan dalam tahap kehidupan yang unik ini dapat menentukan masa depan anak perempuan secara keseluruhan.

Halaman 06

Berinvestasilah dan ciptakan ruang untuk gerakan feminis. organisasi dan gerakan

Sedikit kemajuan dalam hak-hak perempuan akan tercapai tanpa tekanan kolektif dan advokasi dari kaum feminis. Mereka membutuhkan sumber daya yang lebih baik dan ruang yang aman dan terjamin untuk beroperasi dan melakukan advokasi.

Halaman 03

Mempromosikan 'feminisme data' dan menutup kesenjangan gender kesenjangan data sensitif

Menutup kesenjangan data yang sensitif gender sangat penting untuk memantau kebijakan dan menginformasikan keputusan para pembuat kebijakan. Namun, kita harus melangkah lebih jauh untuk juga mempromosikan 'feminisme data', dengan mengakui ketidakseimbangan kekuasaan dan warisan kolonial yang tertanam dalam sistem, praktik, dan lembaga statistik.

Nomor telepon 04

Meningkatkan sumber daya untuk dan investasi dalam pelayanan publik dan infrastruktur sosial, termasuk perawatan

Transformasi sosial yang dibutuhkan untuk kesetaraan gender harus didanai, yang memerlukan anggaran responsif gender, perpajakan progresif dan investasi yang kuat dalam layanan publik dan infrastruktur publik (termasuk perawatan).

Masa depan yang setara gender memerlukan kolaborasi tindakan dan sistem-perubahan level, perbaikan sistem dan bukan wanita.

Indeks bertujuan untuk membantu menjelaskan hal ini sistemik yang lebih luas masalah, bagaimana mereka saling terkait, di mana kita sedang membuat kemajuan, dan di mana kita tidak berada.

Tanggal 07.

Pusat Kesetaraan Gender dan keadilan di jantung hubungan internasional solidaritas dan kerja sama

Kita perlu kolaborasi berkelanjutan lintas pemerintah di ruang multilateral untuk melindungi komitmen kesetaraan gender dari upaya bersama para pelaku antihak asasi manusia. Dan kita perlu bantuan, pinjaman, dan hibah untuk diinvestasikan dalam kesetaraan gender dan program serta kebijakan yang melindunginya.

(Un) setara masa depan?

Kesetaraan gender dalam dunia krisis

Dunia telah berubah secara drastis sejak 2015, ketika 193 negara menyetujui agenda ambisius di balik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sembilan tahun dan pandemi global kemudian, solidaritas global sedang dalam krisis, konflik bersenjata semakin meluas, kerusakan iklim semakin cepat, dan mayoritas penduduk dunia lebih miskin secara riil. Masyarakat merasa lebih bermusuhan, lebih tertutup, dan kurang kooperatif.

Bagaimana prognosis untuk kesetaraan gender dalam semua ini? Itu jauh dari prioritas utama. Anggota koalisi Equal Measures 2030 (EM2030) dan para pejuang gender di seluruh dunia merasa semakin sulit untuk mengangkat kesetaraan gender dalam agenda para pembuat kebijakan. Kita melihat bahwa kesetaraan gender yang sebelumnya diterima Bahasa tentang kesetaraan gender dihapuskan dari perjanjian internasional Kita melihat para donor mengabaikan hak-hak perempuan pada saat yang samapembiayaan anti gender sedang meningkat. Dan bagaimana dengan kesetaraan gender di negara-negara termiskin, di mana Indeks Gender SDG menunjukkan tindakan sangat dibutuhkan? Bahkan lebih jauh di bawah daftar tersebut, dikalahkan oleh tantangan domestik lainnya dan kurangnya solidaritas internasional.

Betapa picik dan gegabahnya. Banyak krisis sosial dan ekonomi yang telah menjadi begitu parah dalam beberapa tahun terakhir justru terjadi karena kita hidup di dunia yang tidak setara. Dunia yang memilah dan mengeksploitasi orang dan planet berdasarkan nilai 'produktif'. Dunia yang memperlakukan perempuan dan anak perempuan1 seperti warga negara kelas dua yang terlahir untuk melayani, merawat, dan bereproduksi. Hal ini mencerminkan pilihan kebijakan, bukan keniscayaan.**Dan pilihan-pilihan ini saat ini menjerat kita dalam 'perangkap ketidaksetaraan gender.'**

Ketika kita menyusun masyarakat kita dengan tujuan untuk menutup kesenjangan dan menghilangkan hambatan bagi perempuan dan anak perempuan, kita juga merancang masyarakat yang lebih setara, lebih berkelanjutan, dan lebih damai. Ketika organisasi dan gerakan feminis memiliki sumber daya yang cukup dan mampu bergerak bebas, mereka mendorong undang-undang, kebijakan, dan keputusan anggaran yang melindungi orang-orang yang rentan serta planet kita yang rentan. Masyarakat yang lebih setara mendapatkan manfaat dari bakat dan kontribusi semua orang. Masyarakat yang lebih setara cenderung tidak menghadapi krisis dan lebih mampu mengatasi krisis yang muncul.**Dengan cara ini terletak 'masa depan yang setara gender.'**

Namun, seperti yang ditunjukkan Indeks Gender SDG 2024, belum ada satu negara pun yang lolos dari perangkap ketidaksetaraan gender: tidak ada satu negara pun yang berada di jalur yang tepat untuk mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030, tahun di mana setiap negara berkomitmen untuk melakukannya. Jika tren saat ini terus berlanjut, kesetaraan gender global tidak akan tercapai hingga abad ke-22.

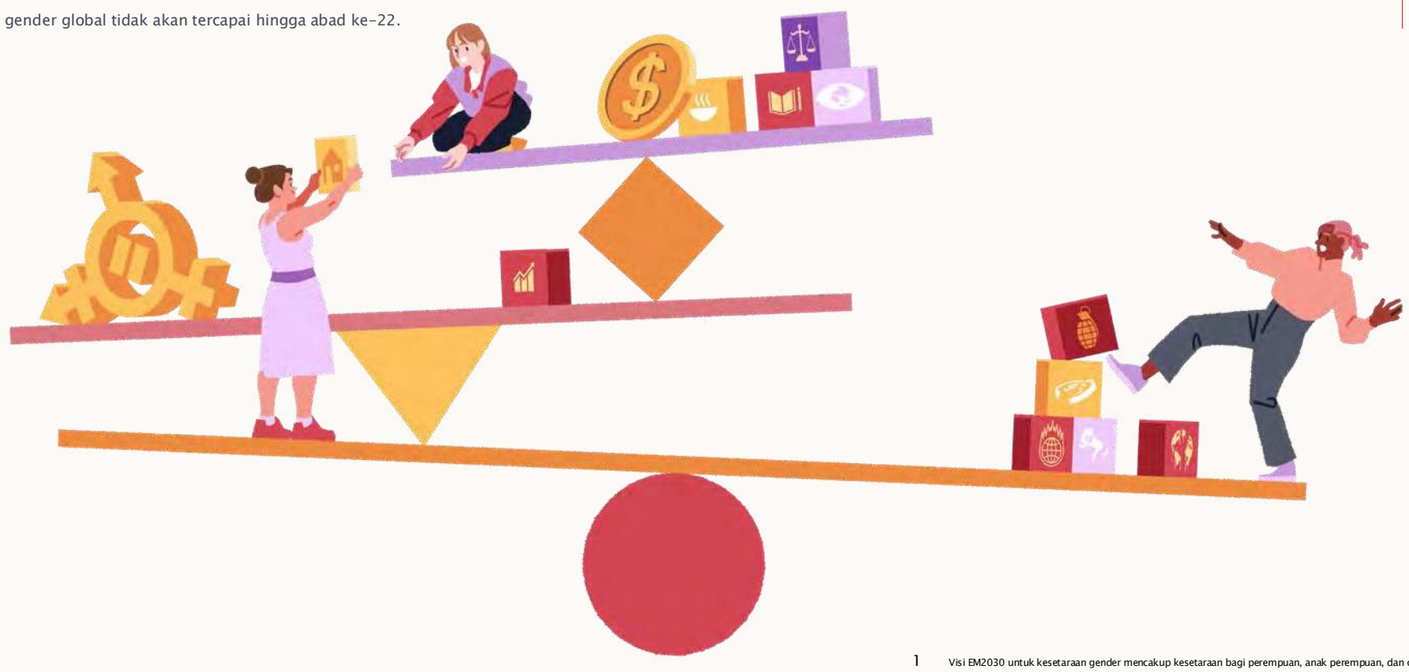

Kami tahu apa yang harus melakukan dan apa dipertaruhkan.

Apa Apakah kita menunggu untuk?

Seorang gadis yang lahir hari ini harus menunggu hingga ulang tahunnya yang ke-97 – melampaui rentang hidupnya yang diharapkan – untuk merayakan masyarakat yang setara.

Mengingat adanya krisis yang saling terkait yang akan mendominasi enam tahun terakhir Agenda 2030 (lihat*Masa depan dengan krisis yang saling terkait*), bahkan tren yang sudah mengecewakan ini mungkin terlalu optimis. Hampir 40 persen negara – rumah bagi lebih dari 1 miliar perempuan dan anak perempuan – mengalami stagnasi atau bahkan penurunan kesetaraan gender antara tahun 2019 dan 2022. Jumlah negara yang mengalami penurunan nyata dalam situasi bagi perempuan dan anak perempuan melonjak dari 10 negara antara tahun 2015 dan 2019 menjadi 17 negara antara tahun 2019 dan 2022.

Jika tren kemunduran ini terus berlanjut, kesetaraan gender global mungkin lebih buruk pada tahun 2030 dibandingkan saat SDG disepakati pada tahun 2015.

Kemungkinan yang mengejutkan ini merupakan ancaman terhadap pencapaian seluruh Agenda 2030: menurut penilaian kamihampir tiga perempat (74 persen) target SDG dianggap bergantung secara langsung atau signifikan pada kesetaraan gender.

Saat para pemimpin dunia bersiap untuk KTT Masa Depan, apakah peringatan – bahwa kita bisa mengakhiri dekade ini dengan tingkat kesetaraan yang lebih rendah dibandingkan saat SDG dimulai – benar-benar telah didengar? Kesenjangan gender harus dilihat sebagai 'sistem peringatan dini' – ketika ketidaksetaraan yang memengaruhi 50 persen populasi dunia diabaikan, dikesampingkan, atau secara aktif diperburuk, krisis lain akan semakin parah dan masyarakat akan menjadi kurang tangguh.

Kesetaraan gender memegang kunci menuju masa depan yang lebih setara, sejahtera, stabil, dan berkelanjutan. Indeks kami menyoroti area-area yang memerlukan lebih banyak perhatian, serta area-area yang upaya-upaya terkoordinasinya telah menghasilkan perubahan positif. Cetak biru kami menguraikan tujuh rekomendasi utama bagi pemerintah untuk mempercepat kemajuan dalam kesetaraan gender.

Kemajuan menuju kesetaraan gender adalah mungkin – dan penting bagi masa depan kita bersama – tetapi hal itu tidak dapat dipastikan.

1 Visi EM2030 untuk kesetaraan gender mencakup kesetaraan bagi perempuan, anak perempuan, dan orang-orang yang memiliki pandangan gender yang luas dalam semua keberagaman mereka. Tidak selalu mungkin untuk menulis lebih dari sekadar biner dalam laporan ini karena kesenjangan dan keterbatasan data (lihat*Kotak 1: Kesenjangan data dan Indeks Gender SDG 2024*).

Indeks Gender SDG 2024: gambaran besar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2024 Gender Index merupakan penelitian andalan produk EM2030 – terkemuka koalisi global tentang akuntabilitas untuk kesetaraan gender dan SDGs. Indeks ini merupakan indeks yang paling lengkap indeks global tersedia untuk mengukur jenis kelamin persamaan.

Indeks 2024 mengukur kemajuan kesetaraan gender di 139 negara (mencakup 96 persen perempuan dan anak perempuan di dunia) dengan memberi skor setiap negara dari nol hingga 100 (100 berarti target telah tercapai) pada 56 isu kesetaraan gender yang sejalan dengan 14 dari 17 SDGs (lihat *Lampiran 1*). Indikator tersebut secara khusus merujuk pada kesetaraan gender atau terkait dengan isu yang memiliki dampak tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan, seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi atau kerentanan terhadap perubahan iklim.

Indeks 2024 melacak data dari tiga tahun referensi – 2015, 2019, dan 2022 – yang memungkinkan perbandingan hasil sebelum dan sesudah dimulainya pandemi COVID-19. Untuk pertama kalinya, tahun referensi ini dapat digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan negara per negara. Kami juga telah memperkirakan berbagai skenario potensial bagi dunia hingga tahun 2030.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang metodologi dan pendekatan yang mendasari Indeks Gender SDG 2024, lihat Tentang halaman indeks di situs web EM2030 dan audit formal desain Indeks.

Mengapa Indeks ini melampaui SDG 5?

SDG 5 – "Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan"–meliputi isu-isu yang penting untuk memajukan hak-hak perempuan dan anak perempuan, termasuk menghapuskan kekerasan berbasis gender dan undang-undang yang diskriminatif; mengakhiri praktik-praktik yang merugikan seperti pernikahan dini/paksa dan mutilasi/pemotongan alat kelamin perempuan (FGM/C); memastikan partisipasi yang setara; dan mengamankan akses universal terhadap kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi.

Namun, untuk menjamin masa depan yang benar-benar setara gender, diperlukan upaya lebih dari sekadar isu yang tercantum dalam SDG 5. Ketika masyarakat tidak memiliki akses terhadap layanan publik, air dan sanitasi, atau sumber energi bersih untuk memasak, perempuan dan anak perempuanlah yang menanggung beban kesenjangan infrastruktur ini. Ketika kebijakan

Jika tidak mempertimbangkan hambatan khusus yang dihadapi anak perempuan (seperti waktu yang dihabiskan untuk mengambil air, jarak ke sekolah, serta tanggung jawab rumah tangga dan perawatan), mereka kehilangan kesempatan belajar. Daftarnya masih panjang.

Masa depan yang setara gender akan lebih adil, aman R, lebih sehat , lagi berkelanjutan , dan masih banyak lagi makmur untuk semua orang.

Masa depan yang setara gender memerlukan tindakan kolektif dan perubahan pada tingkat sistem, memperbaiki sistem dan bukan wanita Indeks ini bertujuan untuk membantu menjelaskan berbagai masalah sistemik yang lebih luas, bagaimana masalah-masalah tersebut saling terkait, di mana kita telah membuat kemajuan, dan di mana kita belum mencapainya.

Kotak 1.

Kesenjangan datadan Indeks Gender SDG 2024

Pembuatan Indeks melibatkan pencarian data terbaik yang tersedia untuk mengukur isu gender tertentu dalam setiap SDG. Melalui kajian ini kami menemukan kesenjangan data gender yang signifikan yang menyoroti kebutuhan mendesak untuk berinvestasi dalam data gender yang lebih banyak dan lebih baik, serta kebutuhan untuk berkonsultasi dengan organisasi dan gerakan feminis sebagai pemilik, produsen, pengguna, dan penasihat. pada data untuk mencerminkan realitas kehidupan mereka.

Kita mengetahui bahwa para pendukung dan pengambil keputusan kesetaraan gender tidak memiliki data dan bukti mengenai beberapa jenis kelamin yang paling penting Masalah kesetaraan, seperti kekerasan berbasis gender (GBV), kesehatan dan hak seksual dan reproduksi, serta beban perawatan. Kesenjangan dalam data yang dapat dibandingkan secara global berarti bahwa beberapa isu ini tidak tercermin dengan baik dalam Indeks seperti yang kami inginkan (meskipun kami telah menggunakan data terbaik yang tersedia).

Penting untuk terus mendorong pemerintah untuk mengakui dan menggunakan data dari masyarakat sipil, terutama yang dihasilkan oleh akar rumput komunitas wanita.

– KAPAL Perempuan, Indonesia

Jenis kelamin advokat tes dan para pengambil keputusan juga mencari data yang mengungkap kesenjangan yang saling terkait dalam kelompok perempuan dan anak perempuan dalam semua keragamannya, misalnya berdasarkan usia, pendapatan, identitas etnis atau agama, lokasi geografis, orientasi seksual, identitas gender, disabilitas, status imigrasi, dan status HIV, di antara faktor-faktor lainnya (lihat *Tidak meninggalkan seorang pun?*).

Data yang tersedia masih terstruktur di sekitar kerangka biner gender, yang dapat membatasi visibilitas dan pemahaman pengalaman orang-orang yang ekspansif terhadap gender. Pendekatan biner ini mengecualikan identitas trans, non-biner, genderqueer, dan identitas genderdiverse lainnya, yang menyebabkan kesenjangan data yang gagal menangkap spektrum penuh keberagaman gender. Mengatasi keterbatasan ini memerlukan peralihan yang disengaja menuju praktik pengumpulan data yang lebih inklusif yang mengakui dan memvalidasi semua identitas gender.

Kami dihadapkan pada beberapa kesenjangan data spesifik dalam menyusun Indeks 2024:tidak memiliki data baru untuk indikator dasar seperti rasio kematian ibu atau ukuran inklusi keuangan atau data angkatan kerja karena keterlambatan pengumpulan data nasional terkait COVID-19. Indikator lain dari Indeks 2022 harus dihilangkan karena cakupan data yang semakin buruk – termasuk yang terkait dengan perempuan dalam STEM, ukuran kemiskinan spesifik gender, dan anak perempuan yang sudah cukup umur dalam pendidikan dasar.

Oleh karena itu, salah satu rekomendasi utama dari cetak biru ini adalah untuk 'mempromosikan feminisme data dan menutup kesenjangan data gender' (lihat *Cetak biru bagi pemerintah*).

Hanya dengan enam tahun tersisa hingga 2030, tidak ada negara yang memiliki mencapai jenis kelamin persamaan

INDEKS GENDER SDG 2024 MENEMUKAN BAHWA, di antara 139 negara yang diteliti, tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai janji kesetaraan gender seperti yang dibayangkan dalam Agenda 2030.

Hal ini memang benar jika kita melihat gambaran 'rata-rata' bagi perempuan dan anak perempuan di suatu negara, tetapi kita juga tahu bahwa kesenjangannya sangat mencolok bagi perempuan dan anak perempuan yang menghadapi diskriminasi dan kerugian tambahan dan saling terkait karena ras atau etnis, kekayaan atau pendapatan, lokasi geografis, orientasi seksual, identitas gender, disabilitas, dan banyak faktor lainnya.

Rata-rata skor global sebesar 66,1/100 pada tahun 2022 tergolong 'buruk', hampir tidak memenuhi syarat kelulusan (lihat*Gambar 1*). Skor rata-rata global hanya sedikit membaik sejak 2015, saat itu skornya 63,7/100. Sejak SDGs disepakati pada 2015, dunia hanya mencatat peningkatan yang tidak signifikan sekitar sepertiga poin (dari 100) per tahun pada Indeks.

Menurut Indeks tersebut, negara-negara dengan skor keseluruhan 90 atau lebih memiliki skor 'sangat baik' untuk kesetaraan gender, sementara negara-negara dengan skor kurang dari 60 dianggap sebagai lingkungan yang 'sangat buruk' bagi perempuan dan anak perempuan (lihat*Gambar 1*).

Gambar 1.

Sistem penilaian Indeks Gender SDG

TINGKAT SKOR

Tingkat skor Indeks suatu negara didasarkan pada skala 0 sampai 100 poin, dimana 0 adalah skor terendah dan 100 poin adalah yang tertinggi. Skor 100 menunjukkan bahwa suatu negara telah memenuhi target kesetaraan gender untuk isu tersebut. Skor tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam lima kategori dengan label yang dikaitkan dengan skornya, dari 'sangat baik' hingga 'sangat buruk'. Misalnya, suatu negara yang menerima skor 84 untuk SDG 4 tentang pendidikan berkualitas akan dianggap 'baik' dalam hal kinerjanya pada kesetaraan gender pada tujuan ini.

LAJU PERUBAHAN

KEMAJUAN CEPAT: Skor meningkat lebih dari 0,6 poin per tahun

BEBERAPA KEMAJUAN: Skor meningkat sebesar 0,2 hingga 0,6 poin per tahun

TIDAK ADA KEMAJUAN: Skor tetap 'sama' (selisih antara −0,2 dan +0,2 poin per tahun)

MENOLAK: Skor menurun lebih dari −0,2 poin per tahun

Laju perubahan skor suatu negara sejak 2019 (atau 2015) diwakili oleh empat kategori, dari 'kemajuan cepat' hingga 'penurunan'. Misalnya, suatu negara yang menaikkan skornya dari 82 pada tahun 2019 menjadi 84 pada tahun 2022 akan dianggap telah membuat 'sedikit kemajuan'.

"Kemajuan cepat" harus dilihat sebagai sesuatu yang cepat dibandingkan dengan negara lain selama periode waktu tertentu, dan bukan relatif terhadap laju perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai target SDG. Meskipun semua ukuran perubahan harus dikontekstualisasikan, negara yang memulai dari tingkat skor yang lebih rendah memiliki potensi untuk laju perubahan yang lebih besar.

Gambar 2.

Skor, tren, dan peringkat Indeks Gender SDG 2024 menurut negara

Tahun 2024 PANGKAT	NEGARA	Tahun 2024 SKOR	TREN Tahun 2015-2019 / Tahun 2019 sampai 2022	RAMALAN Tahun 2022-2030
1	Swiss	90.1	■ ⏫	▲
2	Swedia	89.3	■ ■	■
3	Denmark	89.0	▲ ■	▲
4	Norwegia	88.5	■ ■	■
5	Finlandia	87.2	■ ▲	■
6	Irlandia	86.6	⏫ ⏫	⏫
7	Belanda	86.5	■ ■	■
8	Luksemburg	86.3	■ ▲	■
9	Austria	86.1	▲ ■	▲
10	Slovenia	85.3	■ ⏫	▲
11	Jerman	85.1	■ ▲	■
12	Islandia	83.9	■ ■	■
13	Singapura	83.3	▲ ▲	▲
14	Selandia Baru	83.0	■ ■	■
15	Estonia	82.9	▼ ⏫	■
16	Bahasa Indonesia: Australia	82.6	▼ ▲	■
17	Belgia	82.6	▼ ⏫	■
18	Kanada	82.4	■ ■	■
19	Spanyol	82.3	▲ ▲	▲
20	Republik Ceko	81.9	▲ ■	■
21	Inggris Raya	81.4	■ ■	■
22	Latvia	80.8	■ ⏫	▲
23	Lithuania	80.5	▼ ⏫	■
24	Perancis	80.4	■ ■	■
25	Portugal	79.9	▲ ▲	▲
26	Korea Selatan	78.9	▲ ⏫	⏫
27	Slowakia	78.7	▲ ▲	▲
28	Kroasia	77.9	■ ⏫	■
29	Polandia	77.6	▲ ▼	▲
30	Israel	77.5	▲ ■	▲
31	Italia	77.1	▲ ⏫	▲
32	Uni Emirat Arab	76.5	⏫ ⏫	⏫
33	Bahasa Indonesia:	76.4	▲ ▲	▲
34	Hongaria	76.4	▲ ■	■
35	Jepang	76.3	■ ■	■
36	Malta	76.1	■ ■	■
37	Serbia	75.7	⏫ ⏫	⏫
38	Kosta Rika	75.3	▲ ▲	▲
39	Siprus	75.0	▲ ▲	▲
40	Amerika Serikat	74.6	▲ ▼	■
41	Cina	74.6	⏫ ▲	⏫
42	Chili	74.5	■ ⏫	▲
43	Bulgaria	74.0	▼ ⏫	■
44	Montenegro	73.6	▲ ⏫	▲
45	Moldova	73.2	⏫ ⏫	⏫
46	Kazakstan	73.1	▲ ▲	▲
47	Rumania	72.8	▲ ▲	▲
48	Argentina	72.7	▼ ⏫	■
49	Yunani	72.6	■ ▲	■
50	Mauritius	72.5	■ ▲	■
51	Bahasa Armenia	72.1	⏫ ▲	⏫
52	Bahasa Indonesia: Georgia	71.8	⏫ ▲	⏫
53	Thailand	71.7	■ ⏫	■
54	Bahasa Indonesia: Kuwait	71.6	▲ ⏫	⏫
55	Malaysia	71.4	⏫ ⏫	⏫
56	Belarusia	71.3	■ ▼	■
57	Vietnam	71.2	▲ ⏫	⏫
58	Albania	71.1	⏫ ▲	⏫
59	Bahasa Indonesia: Uzbek	69.9	▲ ■	■
60	Bosnia dan Herzegovina	69.2	⏫ ▲	⏫
61	Mongolia	68.6	⏫ ▲	⏫
62	Makedonia Utara	68.5	▲ ▼	■
63	Meksiko	68.3	■ ⏫	▲
64	Brazil	68.2	▲ ⏫	▲
65	Kirgistan	67.9	■ ▲	▲
66	Indonesia	67.9	▲ ⏫	▲
67	Tajikistan	67.9	⏫ ▲	⏫
68	Rusia	67.9	⏫ ▲	⏫
69	Arab Saudi	67.6	⏫ ⏫	⏫
70	Filipina	67.5	■ ⏫	▲
71	Afrika Selatan	67.5	▼ ⏫	■
72	Kolumbia	67.4	■ ▲	▲
73	Bahasa Indonesia: Paraguay	67.4	▲ ▲	▲
74	Republik Dominika	66.6	▲ ▲	▲
75	Ukraina	66.5	⏫ ▼	▲
76	Bahasa Indonesia: Peru	66.3	⏫ ■	▲
77	Ekuador	66.2	▼ ■	▼
78	Turki	65.9	■ ■	■
79	Jamaika	65.6	▲ ▲	▲
80	El Salvador	65.1	⏫ ⏫	⏫
81	Azerbaijan	64.9	⏫ ▼	▲
82	Panama	64.4	▲ ▼	■
83	Bolivia	64.3	▲ ■	▲
84	Maroko	63.2	▲ ⏫	▲
85	Turki	63.1	■ ■	■
86	Nikaragua	62.4	■ ■	■
87	Yordania	61.8	▲ ▲	▲
88	Aljazair	61.6	■ ■	■
89	Mesir	61.3	⏫ ■	⏫
90	Nepal	61.3	⏫ ⏫	⏫
91	India	61.2	⏫ ⏫	⏫
92	Bahasa Indonesia: Venezuela	60.5	▼ ⏫	■
93	Kamboja	60.2	⏫ ▲	▲
94	Srilanka	60.0	▲ ▼	▼
95	Guatemala	59.4	▲ ▲	▲
96	Republik Demokratik Rakyat Botswana	59.2	▲ ■	■
97	Indonesia	58.9	⏫ ■	⏫
98	Honduras	58.7	⏫ ■	▲
99	Bahasa Eswatini	58.4	⏫ ■	▲
100	Namibia	58.0	▲ ▲	▲
101	Bahasa Indonesia: Gabon	57.7	⏫ ▲	⏫
102	Bahasa Indonesia:Iran	57.6	■ ▼	■
103	Republik Demokratik Rakyat Laos	56.9	⏫ ▲	▲
104	Rwanda	56.1	▲ ■	▲
105	Bangladesh	55.7	⏫ ▲	▲
106	Myanmar	55.3	▲ ▼	■
107	Senegal	54.9	▲ ▲	▲
108	Irak	53.7	⏫ ⏫	⏫
109	Bahasa Indonesia: Kenya	53.1	▲ ▼	■
110	Indonesia	52.6	■ ■	■
111	Indonesia	52.5	⏫ ▲	⏫
112	Kamerun	52.2	▲ ▲	▲
113	Libanon	51.6	▼ ▼	▼
114	Bahasa Indonesia: Benin	51.1	⏫ ⏫	⏫
115	Mozambik	50.7	▲ ■	▲
116	Pantai Gading	50.7	⏫ ▲	▲
117	Zambia	50.5	■ ⏫	▲
118	Malawi	50.1	▲ ▲	▲
119	zimbabwe	50.0	■ ■	■
120	Bahasa Mali	50.0	⏫ ▲	⏫
121	Uganda	50.0	■ ⏫	▲
122	Togo	49.3	▲ ⏫	▲
123	Bahasa Indonesia: Pakistan	48.9	■ ■	■
124	Etiopia	48.4	▲ ■	■
125	Guinea	47.9	⏫ ⏫	⏫
126	Mauritania	47.6	■ ▲	■
127	Nigeria	47.4	■ ▲	▲
128	Gambia	47.3	▲ ▼	■
129	Burkina Faso	46.9	⏫ ▼	▲
130	Haiti	46.2	⏫ ▼	▲
131	Kongo	45.4	▲ ⏫	▲
132	Liberia	45.0	▲ ▲	▲
133	Madagaskar	44.7	▲ ▲	▲
134	Burundi	43.0	■ ▲	▲
135	RD Kongo	42.2	⏫ ▼	▲
136	Sierra Leone	42.0	▲ ■	■
137	Bahasa Indonesia: Nigeria	41.0	▲ ■	■
138	Bahasa Indonesia: Chad	40.1	⏫ ⏫	⏫
139	Afganistan	35.4	■ ▼	▼

Sumber: Indeks Gender SDG 2024, Pengukuran yang Setara 2030.

Swiss menduduki puncak Indeks 2024 (lihat*Gambar 2*), menjadikannya negara dengan kesetaraan gender tertinggi di dunia, dan tahun pertama di mana negara non-Nordik menduduki puncak Indeks. Swiss adalah satu-satunya negara yang memperoleh skor 'sangat baik', dan juga bergerak 'cepat' antara tahun 2019 dan 2022 dengan memperbaiki beberapa isu kesetaraan gender yang diukur dalam Indeks termasuk meningkatkan jumlah perempuan dalam delegasi perubahan iklim (COP) (Ind. 13.1), mengubah undang-undang tentang orientasi seksual (Ind. 10.5) dan cuti keluarga (Ind. 8.4), meningkatkan infrastruktur untuk mendukung perdagangan dan transportasi (Ind. 11.4), dan mengurangi kekhawatiran perempuan tentang korupsi pemerintah (Ind. 17.3).

10 negara teratas dalam Indeks 2024 adalah:

1. Swiss
2. Swedia
3. Denmark
4. Norwegia
5. Finlandia
6. Irlandia
7. Belanda
8. Luksemburg
9. Austria
10. Slovenia

Tiga negara dengan skor terendah dalam Indeks 2024 adalah:

1. Afganistan
2. Chad
3. Nigeria

Secara total, 19 negara memiliki skor di bawah 50 dari 100, yang berarti mereka kurang dari separuh jalan dalam mencapai target utama kesetaraan gender di seluruh SDG.

Gambar 3.

Populasi perempuan dan anak perempuan menurut skor indeks, 2022

Jumlah penduduk dalam jutaan (M) dan milyaran (B)

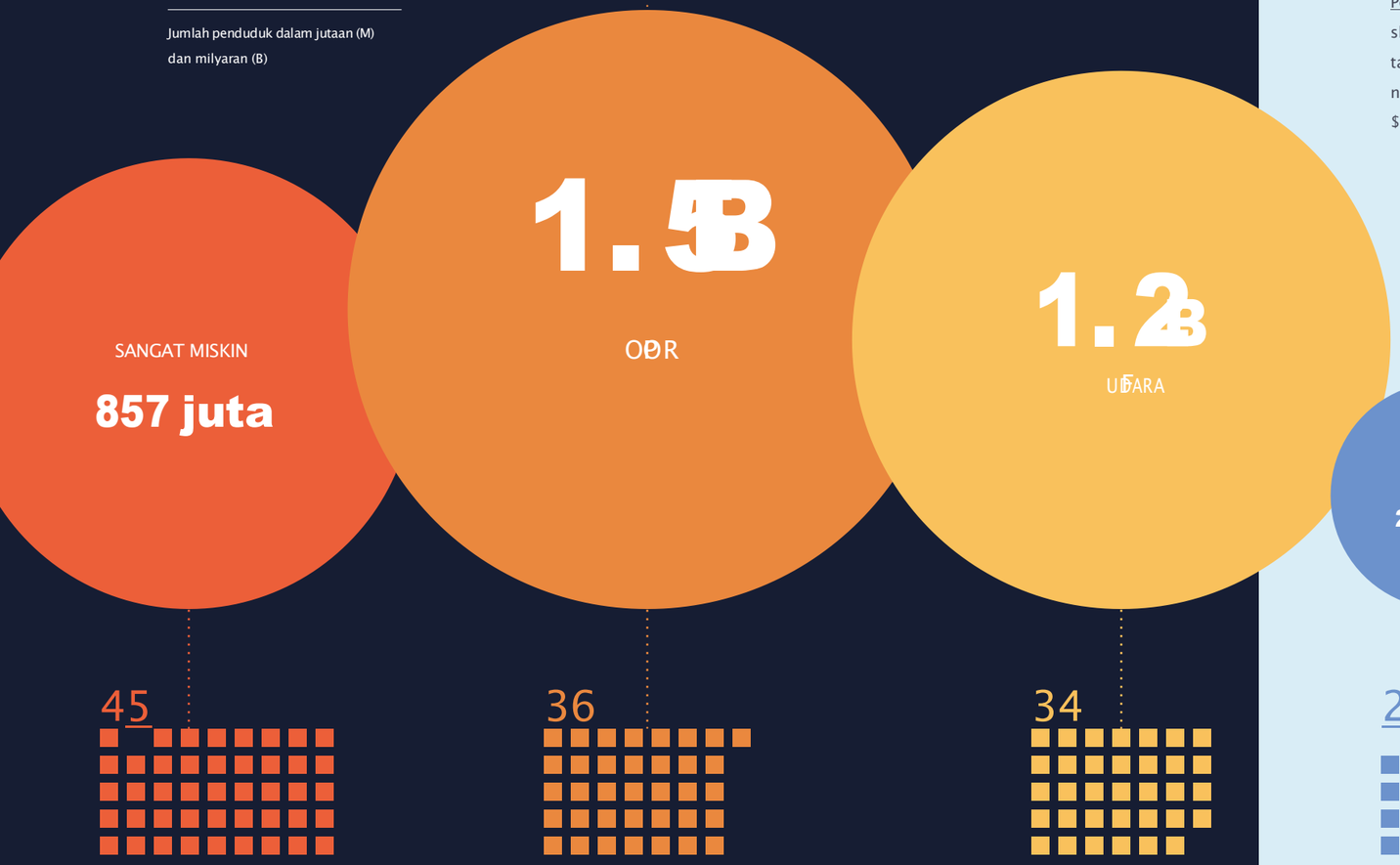

Sumber: Indeks Gender SDG 2024, Equal Measures 2030 dan UNDESA.

Apa arti skor kesetaraan gender yang 'sangat buruk' bagi kehidupan wanita dan anak perempuan?

Kesenjangan gender sangat bervariasi berdasarkan konteksnya, namun ada beberapa tema umum:

Konflik kekerasan

16 dari 45 negara dengan skor Indeks 'sangat buruk' muncul didaftar negara yang mengalami tingkat konflik kekerasan tertinggi di dunia.

Tingkat kemiskinan absolut yang sangat tinggi

Pendapatan per kapita rata-rata di negara-negara dengan skor Indeks 'sangat buruk' hanya $5.641 per orang per tahun, kurang dari delapan persen pendapatan di negara-negara dengan skor Indeks 'baik'/'sangat baik' (rata-rata $72.918 per orang per tahun).

2,4 miliar

perempuan dan anak perempuan tinggal di negara-negara dengan**'sangat miskin'**atau **'miskin'**skor (lihat*Gambar 3*pada kesetaraan gender pada tahun 2022.)

Pendidikan dipersingkat untuk anak perempuan

Pendidikan menengah (Ind. 4.4) tidak terjangkau oleh banyak anak perempuan di negara-negara dengan skor Indeks 'sangat buruk': di negara-negara ini rata-rata 69 persen perempuan dan anak perempuan tidak mengenyam pendidikan menengah sama sekali (hampir dua kali lipat rata-rata global).

Infrastruktur dan layanan dasar yang buruk

Rata-rata, kurang dari separuh orang (46 persen) di negara-negara dengan skor Indeks 'sangat buruk' memiliki akses ke layanan sanitasi dasar (Ind. 6.2).

Tingginya angka kesuburan remaja (termasuk 'kehamilan paksa')

Angka kelahiran di kalangan gadis remaja (Ind. 3.2) jauh lebih tinggi di negara-negara dengan skor Indeks 'sangat buruk': di negara-negara ini, hampir 1 dari 12 gadis berusia 15 hingga 19 tahun melahirkan. Bandingkan ini dengan angka kelahiran di negara-negara dengan skor Indeks 'baik', yaitu 1 dari 167 gadis.

Kurangnya undang-undang yang melindungi komunitas LGBTQIA

Undang-undang yang bertujuan mencegah diskriminasi berdasarkan orientasi seksual (Ind. 10.5) hampir tidak ada di negara-negara dengan skor Indeks 'sangat buruk'.

Gambar 4.

PDB per kapita dan Skor Indeks Gender SDG, 2022

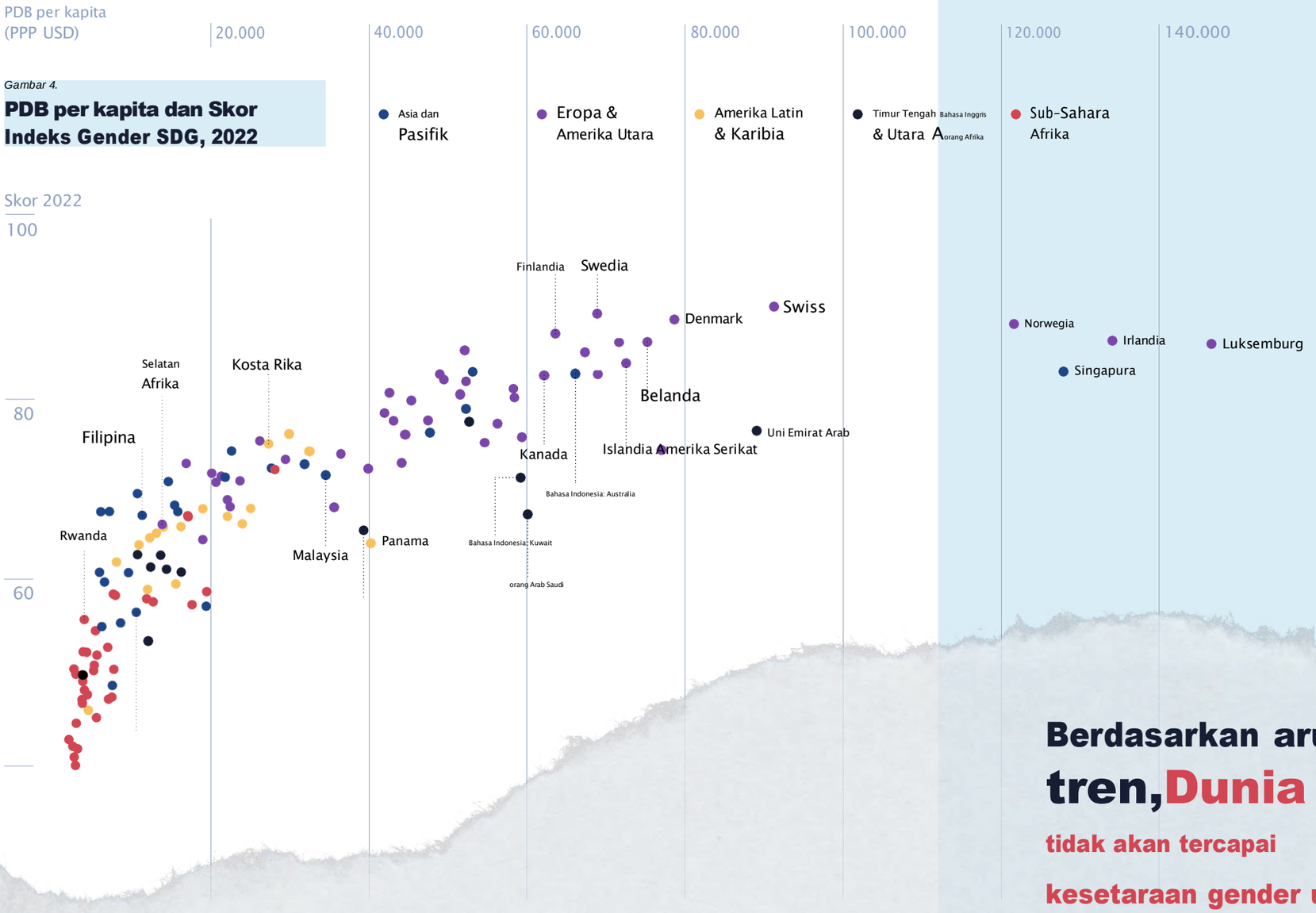

Kosta Rika mengungguli Amerika Serikatdengan hanya sepertiga (34 persen) dari PDB per kapitanya.

Filipina dan Afrika Selatan sama-sama setara Skor Indeks Arab Saudidengan kurang dari satu kelima dan sekitar seperempat (17 dan 27 persen) dari PDB per kapita, masing-masing.

Rwanda, Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Iran memiliki kesamaan Skor indeks tetapi PDB per kapita sangat berbeda:

Pada tahun 2022, pendapatan per kapita Rwanda adalah $3.061, pendapatan per kapita Laos adalah $8.794, dan pendapatan per kapita Iran adalah $16.591.

Sumber: Indeks Gender SDG 2024, Equal Measures 2030 dan Bank Dunia.

Melakukan lebih banyak hal untuk kesetaraan gender dengan lebih sedikit

Kesetaraan gender tidak sepenuhnya terkait dengan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Meskipun negara-negara berpendapatan tinggi, diukur berdasarkan PDB, umumnya memiliki skor kesetaraan gender yang lebih tinggi daripada negara-negara berpendapatan rendah, data menunjukkan hal ini tidak selalu terjadi (lihat*Gambar 4*). Beberapa negara berhasil menciptakan masyarakat yang lebih setara gender dengan sumber daya yang sama atau lebih sedikit, sementara negara lain berkinerja buruk dibandingkan dengan tingkat pendapatan mereka.

Titik awal yang berbeda untuk kesetaraan gender

Skor suatu negara pada Indeks Gender SDG mencerminkan kinerja negara tersebut dalam hal kesetaraan gender pada suatu titik waktu tertentu. Namun, Indeks 2024 bersifat unik karena dapat lebih dari sekadar membandingkan skor suatu negara pada satu titik waktu, melainkan juga membandingkan kecepatan kemajuan dan arah perjalanannya. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat bukan hanya dari titik awal suatu negara, tetapi juga bagaimana kemajuannya dan mempertimbangkan bagaimana tren masa lalu dapat berkembang di masa mendatang (hingga batas waktu 2030 dan seterusnya).

Berdasarkan arus tren, Dunia tidak akan tercapai kesetaraan gender untuk hampir satu abad

INDEKS 2024 MENYAMPAIKAN KENYATAAN YANG MENGEJUTKAN: kemajuan global menuju kesetaraan gender sangat lambat (lihat*Gambar 5*). Lintasan kesetaraan gender global secara keseluruhan hampir tidak berubah sejak SDG disetujui pada tahun 2015.

Jika tren saat ini terus berlanjut, kesetaraan gender global tidak akan tercapai hingga abad ke-22. Seorang gadis yang lahir saat ini harus menunggu hingga ulang tahunnya yang ke-97 – melampaui usia harapan hidupnya di setiap negara – untuk menyaksikan masyarakat yang benar-benar setara.

Gambar 5.

Skor Indeks rata-rata global, 2015, 2019 dan 2022

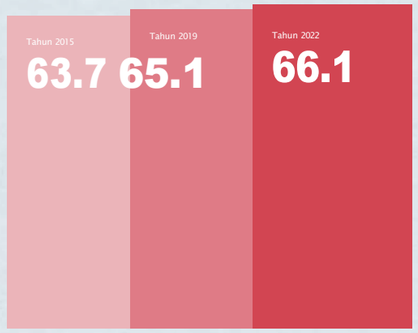

Sumber: Indeks Gender SDG 2024, Pengukuran yang Setara 2030.

Gambar 6.

Skor Indeks Negara berdasarkan tingkat dan laju perubahan, 2019-2022

Catatan: Negara-negara dikelompokkan berdasarkan tingkat skornya dan diurutkan berdasarkan abjad dalam kelompoknya. Warna peta sesuai dengan tingkat skor. Dalam peta, negara-negara yang diwarnai abu-abu gelap tidak melaporkan data yang cukup untuk menghitung skor Indeks.

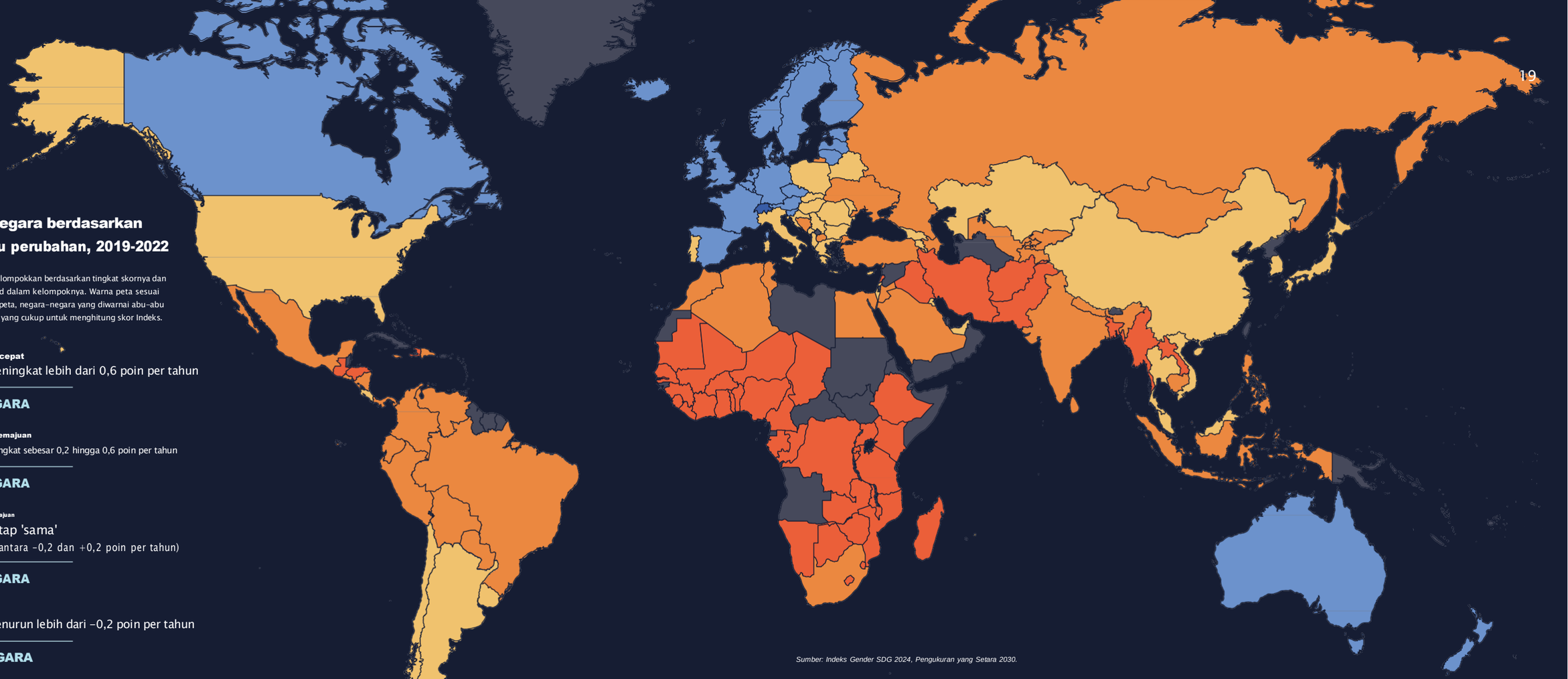

Laju Perubahan, 2019-2022

▲ **Kemajuan cepat**
Skor meningkat lebih dari 0,6 poin per tahun
41 NEGARA

▲ **Beberapa kemajuan**
Skor meningkat sebesar 0,2 hingga 0,6 poin per tahun
45 NEGARA

■ **Tidak ada kemajuan**
Skor tetap 'sama'
(margin antara -0,2 dan +0,2 poin per tahun)
36 NEGARA

▼ **Menolak**
Skor menurun lebih dari -0,2 poin per tahun
17 NEGARA

Sumber: Indeks Gender SDG 2024, Pengukuran yang Setara 2030.

SANGAT BAIK (90-100 POIN)

▲ Swiss

1 NEGARA

BAGUS (80-90 POIN)

▲ Belgia
Estonia
Irlandia
Latvia
Lithuania
Slovenia

▲ Bahasa Indonesia: Australia
Finlandia
Jerman
Luksemburg
Singapura
Spanyol

■ Austria
Kanada

Republik Ceko
Denmark
Perancis
Islandia
Belanda
Selandia Baru
Norwegia
Swedia
Inggris Raya

23 NEGARA

ADIL (70-80 POIN)

▲ Argentina
Bulgaria
Chili
Kroasia
Italia

Bahasa Indonesia: Kuwait
Malaysia
Moldova
Montenegro
Serbia
Korea Selatan
Thailand
Uni Emirat Arab
Vietnam

▲ Albania

Bahasa Armenia
Cina
Kosta Rika
Siprus

Bahasa Indonesia: Georgia
Yunani
Kazakstan
Mauritius
Portugal
Rumania
Slowakia

Bahasa Indonesia:

■ Hongaria
Israel
Jepang
Malta

▼ Belarusia
Polandia
Amerika Serikat

34 NEGARA

BURUK (60-70 POIN)

▲ Brazil
El Salvador
India
Indonesia
Meksiko
Maroko
Nepal
Filipina
Arab Saudi
Afrika Selatan

Bahasa Indonesia: Venezuela

▲ Bosnia dan Herzegovina
Kamboja
Kolumbia
Republik Dominika
Jamaika

Yordania
Kirgistan
Mongolia

Bahasa Indonesia: Paraguay
Rusia
Tajikistan

■ Aljazair
Bolivia
Ekuador
Mesir
Nikaragua

Bahasa Indonesia: Peru
Turki
Turki

Bahasa Indonesia: Uzbek

▼ Azerbaijan
Makedonia Utara
Panama
Srilanka
Ukraina

36 NEGARA

SANGAT BURUK (<60 POIN)

▲ Bahasa Indonesia: Benin

Bahasa Indonesia: Chad
Kongo

Bahasa Indonesia: Gabon
Guinea
Irak
Togo
Uganda
Zambia

▲ Bangladesh
Burundi
Kamerun
Pantai Gading
Guatemala

Republik Demokratik Rakyat Laos
Liberia
Madagaskar
Malawi

Bahasa Mali
Mauritania
Namibia
Nigeria
Senegal
Indonesia

■ Republik Demokratik Rakyat Botswana

Bahasa Eswatini
Etiopia
Indonesia
Honduras
Indonesia
Mozambik

Bahasa Indonesia: Nigeria

Bahasa Indonesia: Pakistan
Rwanda
Sierra Leone
zimbabwe

▼ Afganistan
Burkina Faso
RD Kongo
Gambia
Haiti

Bahasa Indonesia:Iran

Bahasa Indonesia: Kenya
Libanon
Myanmar

45 NEGARA

Hampir 1/3 dari negara-negara yang dibuat **'kemajuan cepat'** menuju gender persamaan.

Beberapa negara membaik, sementara negara lain justru mengalami kemunduran

Di sisi positifnya, hampir sepertiga negara (41 dari 139) membuat 'kemajuan cepat' menuju kesetaraan gender dan lebih dari separuh negara (86 dari 139) bergerak ke arah yang benar antara tahun 2019 dan 2022 (lihat*Gambar 6*).

Namun, hampir setengah dari negara-negara dengan 'kemajuan cepat' ini memulai dari titik awal yang sangat rendah, dengan skor Indeks 'buruk' atau 'sangat buruk' (lihat *Gambar 7*). Tidak mengherankan jika negara-negara dimulai dengan skor Indeks yang lebih rendah mampu membuat kemajuan yang cepat. Negara-negara di puncak Indeks akan menghadapi tantangan dalam menjangkau populasi yang paling terpinggirkan, yang dapat membuat kesenjangan lebih lambat untuk ditutup (konsep 'mil terakhir'). Namun, ada negara-negara dengan skor 'sangat baik' atau 'baik' yang masih berhasil membuat 'kemajuan cepat'.

Antara tahun 2019 dan 2022, hampir 40 persen negara – yang merupakan rumah bagi lebih dari 1 miliar perempuan dan anak perempuan – mengalami stagnasi atau kemunduran dalam hal kesetaraan gender.

Bukan hanya negara-negara berpendapatan rendah atau negara-negara dengan titik awal yang rendah dalam kesetaraan gender yang mengalami kemunduran atau tetap stagnan – misalnya, Austria, Prancis, dan Malta semuanya berada dalam bahaya mengalami penurunan, dengan skor Indeks yang stagnan antara tahun 2019 dan 2022 (lihat*Gambar 6*).

Negara-negara yang memperlihatkan peningkatan terbesar dalam skor Indeks Gender SDG mereka sejak 2019 disorot dalam Gambar 7 dan negara-negara yang mengalami penurunan paling besar sejak 2019 pada Gambar 8.

Gambar 7.

Negara-negara yang mengalami kemajuan tercepat antara tahun 2019 dan 2022

Perubahan dalam poin skor indeks

Catatan: Skor mungkin tidak berjumlah karena pembulatan.

Sumber: Indeks Gender SDG 2024, Pengukuran yang Setara 2030.

Gambar 8.

Negara-negara yang mengalami penurunan paling besar antara tahun 2019 dan 2022

Perubahan dalam poin skor indeks

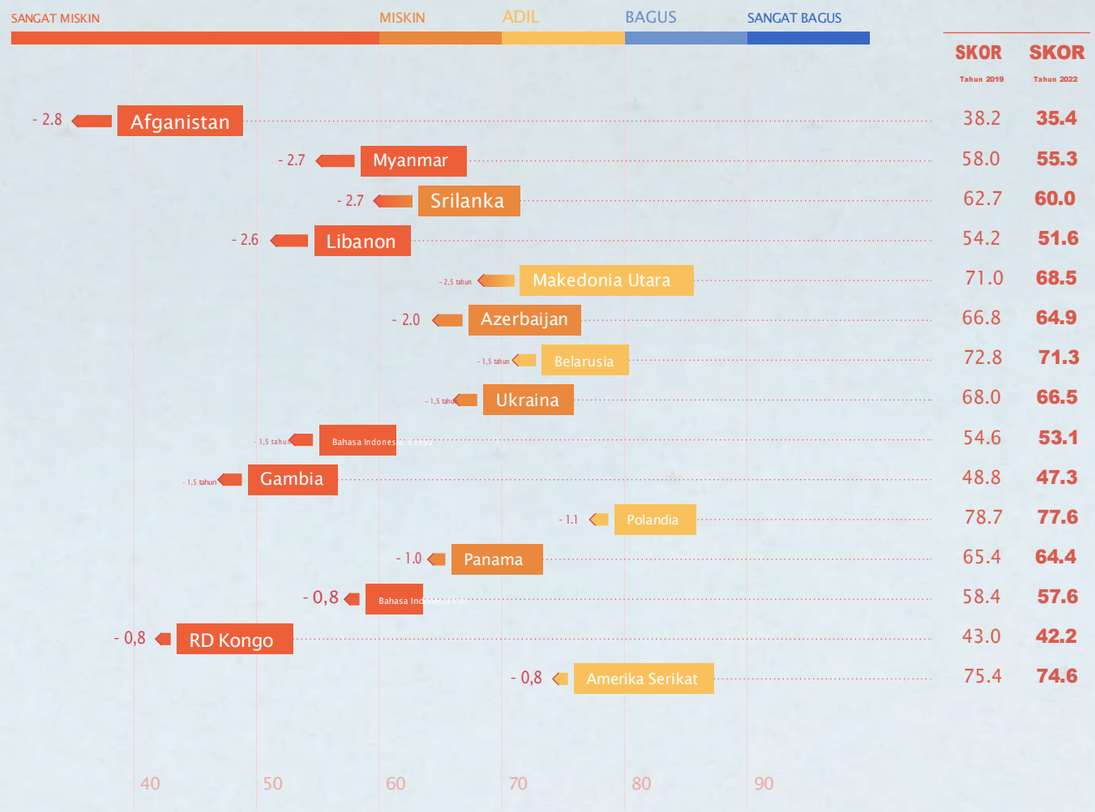

Catatan: Skor mungkin tidak berjumlah karena pembulatan.

Sumber: Indeks Gender SDG 2024, Pengukuran yang Setara 2030.

Akankah dunia menjadi kurang setara pada tahun 2030 dibandingkan pada tahun 2015?

JIKA TREN GENDER GLOBAL SAAT INI kesetaraan gender terus berlanjut, kita akan mencapai kesetaraan gender hampir satu abad lebih lambat dari yang dijanjikan oleh SDGs. Meskipun skenario ini suram, lintasan itu pun mungkin optimis.

Anggota koalisi EM2030 – para pendukung kesetaraan gender yang bekerja di seluruh wilayah di dunia – tidak hanya mengantisipasi krisis saling terkait yang kita eksplorasi di*Masa depan dengan krisis yang saling terkait* di bawah ini; mereka sudah menjalaninya. Anggota koalisi kami bukan satu-satunya yang peduli tentang masa depan: 92 persen pakar yang diajak konsultasiLaporan Risiko Global Forum Ekonomi Dunia 2024 menggambarkan prospek global jangka panjang sebagai 'tidak menentu', 'bergolak' atau 'penuh badai'.

Dengan kemajuan kesetaraan gender yang hampir tidak terlihat antara tahun 2015 dan 2022, kemajuan tersebut dapat dengan mudah menyimpang dari jalurnya dalam enam tahun terakhir SDGs.

Bagaimana jika, dalam enam tahun ke depan, semua negara mengikuti jalur 'penurunan' yang kita amati di 17 negara antara tahun 2019 dan 2022? Dalam skenario ini, skor kesetaraan gender global akan berada di bawah titik awal SDGs tahun 2015 (lihat*Gambar 9*).

Hanya diperlukan penurunan skor Indeks sebesar -0,5 poin per tahun untuk membuat kemungkinan menyedihkan ini menjadi kenyataan, yang selanjutnya menjebak dunia dalam ketidaksetaraan gender.

Sekalipun semua negara mengikuti langkah yang ditetapkan oleh negara-negara yang mengalami kemajuan 'cepat' antara sekarang dan 2030, dunia masih akan jauh tertinggal pada tahun 2030.

Kedua skenario tersebut menjebak miliaran perempuan dan anak perempuan serta masyarakat dalam ketimpangan, kurang mampu menghadapi badai yang ada di depan atau memetakan arah menuju masa depan yang lebih setara gender.

Gambar 9.

Gend[illegible]**juan kesetaraan, skenario potensial hingga tahun 2030**

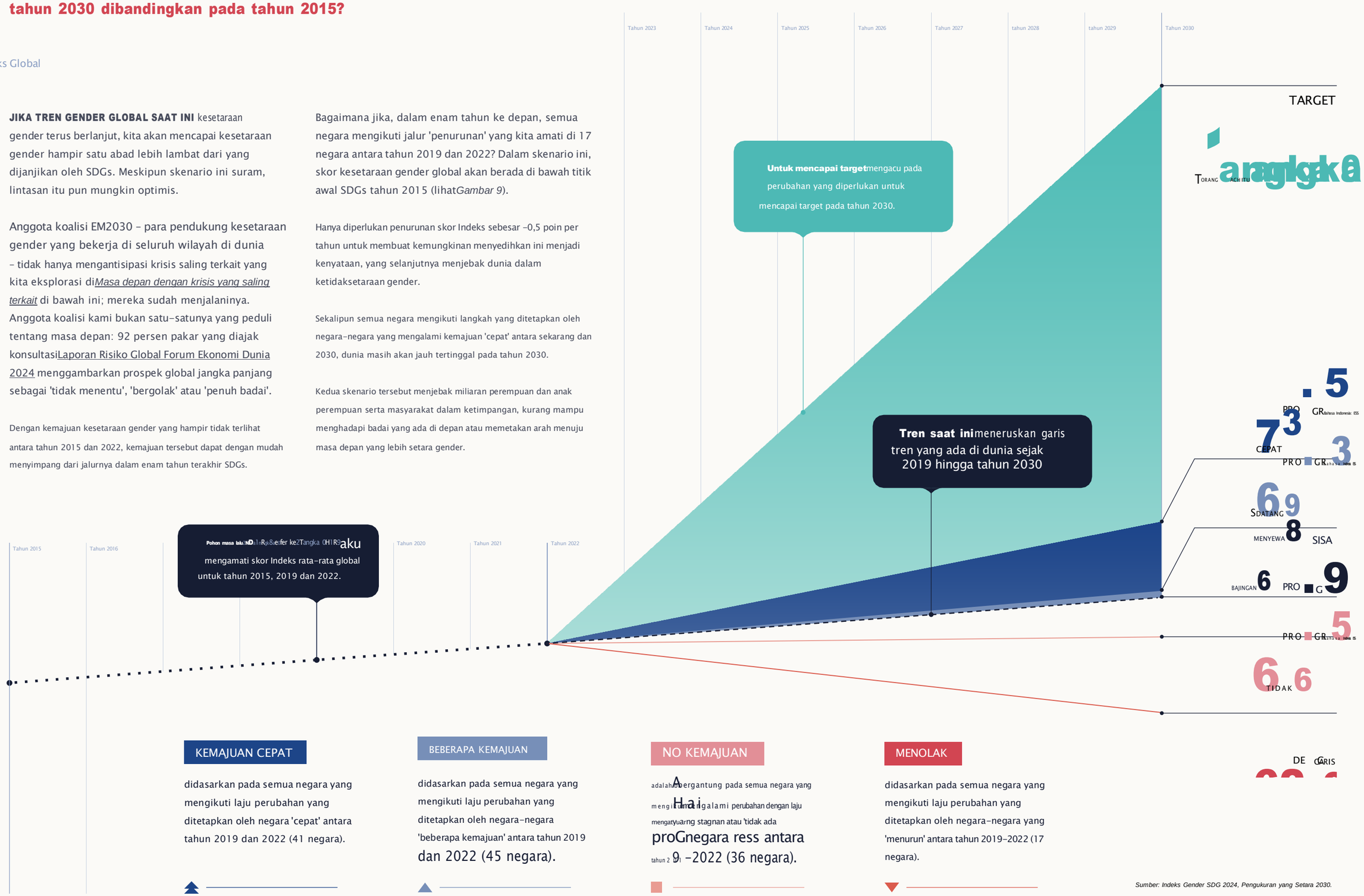

Sumber: Indeks Gender SDG 2024, Pengukuran yang Setara 2030.

Itu 'menolak' skenario: nyata kemungkinan

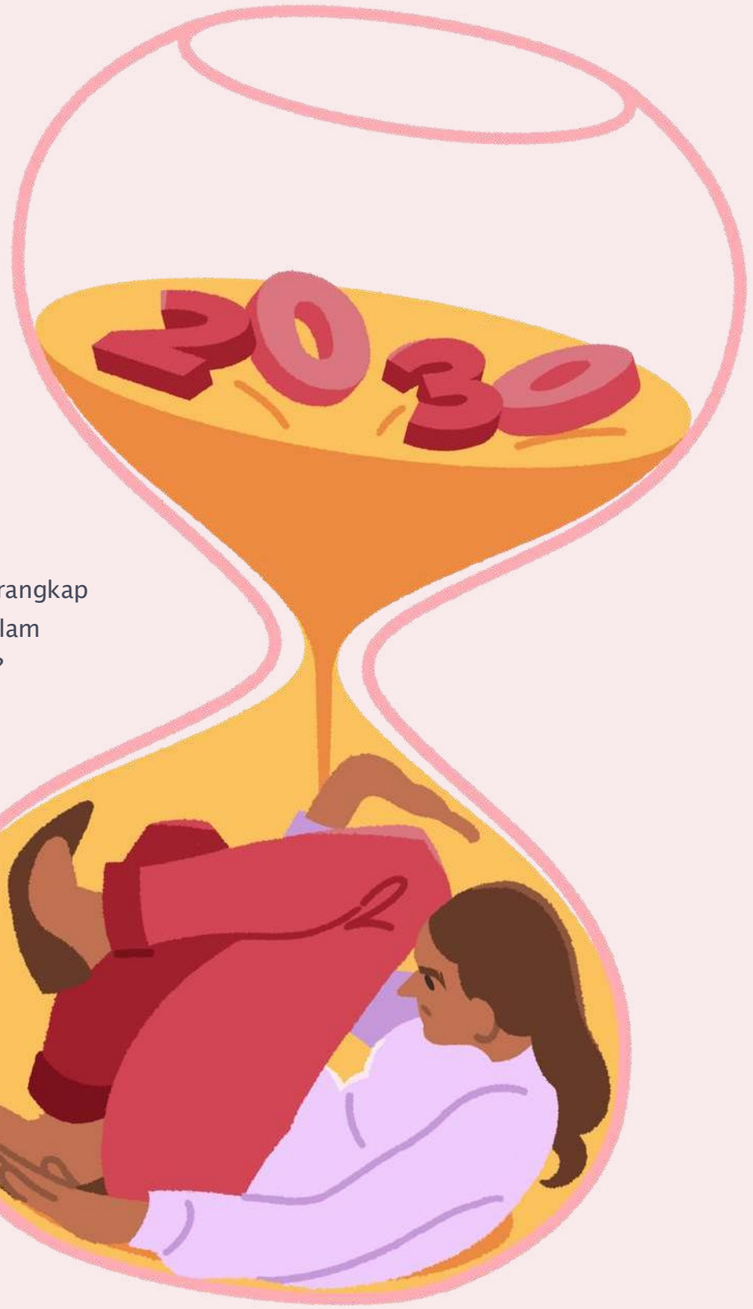

Apa yang membuat Koalisi EM2030 jadi khawatir terjebak dalam perangkap ketidaksetaraan gender dalam enam tahun terakhir SDGs?

Ada tanda-tanda peringatan yang ditemukan di mana-mana Indeks.

Skor lebih banyak negara memburuk antara tahun 2019 dan 2022 dibandingkan periode sebelumnya

Lebih banyak negara yang bergerak mundur dalam kesetaraan gender antara tahun 2019 dan 2022 dibandingkan dengan periode 2015 hingga 2019: jumlah negara yang bergerak mundur dalam kesetaraan gender melonjak dari 10 menjadi 17 sejak 2019.

Jika suatu negara memiliki skor Indeks yang 'menurun', hal ini merupakan penyebab kekhawatiran yang serius. Kemunduran berarti bahwa perubahan negatif telah terjadi di sejumlah dari 56 isu dalam Indeks.

Dan tren kemunduran ini tidak hanya berdampak pada negara-negara termiskin, negara-negara yang menghadapi konflik dan kerapuhan, atau negara-negara yang berada di posisi terbawah Indeks (lihat *Gambar 8*): Amerika Serikat, Polandia, Sri Lanka, dan Kenya semuanya mengalami penurunan skor Indeks mereka antara tahun 2019 dan 2022.

Kesetaraan gender makin buruk dalam kaitannya dengan gizi dan keadilan

Skor dua SDGs secara keseluruhan menurun di tingkat global antara tahun 2019 dan 2022. Meskipun penurunan skor tujuan ini mungkin tampak kecil, namun hal tersebut mencerminkan perubahan negatif dalam berbagai isu dan sejumlah besar negara. Hal ini seharusnya menjadi peringatan.

Kesetaraan gender dan SDG 2 ('Tanpa kelaparan'): Nilai Indeks SDG 2 turun dari 73,8 pada tahun 2019 menjadi 72,6 poin pada tahun 2022. Jika tren saat ini terus berlanjut, nilai tersebut akan turun lagi menjadi 69,4 poin pada tahun 2030. Pendorong perubahan ini antara lain meningkatnya tingkat kerawanan pangan (Ind. 2.2) dan kekhawatiran perempuan tentang kecukupan uang untuk membeli makanan (Ind. 2.4).

Kesetaraan gender dan SDG 16 ('Perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat'): Skor rata-rata global untuk SDG 16 adalah 62,4 pada tahun 2022, turun dari 62,6 pada tahun 2019, dan 62,9 pada tahun 2015. Skor untuk SDG 16 menurun di dua perlima negara antara tahun 2019 dan 2022. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya akses perempuan terhadap keadilan (Ind. 16.1) dan berfungsinya sistem peradilan pidana (Ind. 16.4).

Pandangan perempuan terhadap isu-isu utama semakin memburuk

Beberapa indikator dalam Indeks yang menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir didasarkan pada pandangan perempuan sendiri tentang berbagai isu yang memengaruhi kehidupan mereka. Indikator berbasis persepsi ini (dari Jajak Pendapat Dunia Gallup tahunan) dapat mencerminkan perubahan yang lebih mendekati 'waktu nyata' dan membantu mengantisipasi tren yang muncul.

Indeks Gender SDG 2024 mencakup 12 (dari 56) indikator berdasarkan data dari Gallup World Poll. Empat di antaranya termasuk indikator yang mengalami perubahan paling negatif dari semua indikator dalam Indeks antara tahun 2019 dan 2022:

Perempuan yang melaporkan bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk tempat tinggal/perumahan yang layak dalam 12 bulan terakhir (Ind. 11.1): **Skor menurun di 95 negara.**

Perempuan yang melaporkan memiliki cukup uang untuk membeli makanan yang mereka atau keluarganya butuhkan dalam 12 bulan terakhir (Ind. 2.4): **Skor menurun di 94 negara.**

Perempuan yang melaporkan merasa nyaman dengan pendapatan rumah tangga mereka (Ind. 1.4): **Skor menurun di 65 negara.**

Perempuan yang melaporkan bahwa, jika dalam kesulitan, mereka memiliki saudara atau teman yang dapat diandalkan untuk membantu mereka kapan pun mereka membutuhkan (Ind. 5.2): **Skor menurun di 63 negara.**

Tren negatif dalam pandangan perempuan terhadap isu-isu ini juga terlihat sebelum COVID-19, jadi ini bukan anomali yang terkait dengan pandemi. Dalam banyak konteks, penurunan ini akan terkait dengan faktor-faktor seperti kenaikan biaya pangan, perumahan, dan energi, di samping berkurangnya akses ke jaring pengaman sosial dan layanan publik. Tren ini diperburuk oleh krisis yang saling terkait yang diuraikan dalam*Masa depan dengan krisis yang saling terkait* di bawah.

Tidak meninggalkan seorang pun?

KELOMPOK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN TERTENTU DI semua wilayah mengalami kerugian dan diskriminasi tambahan berdasarkan usia, pendapatan, identitas etnis atau agama, lokasi geografis, orientasi seksual, identitas gender, disabilitas, status imigrasi, dan status HIV, di antara faktor-faktor lainnya.

Kurangnya cakupan data dan disagregasi data yang tidak memadai menghambat kebijakan yang efektif dan membuat kelompok tertentu lebih mudah diabaikan atau diabaikan (lihat*Kotak 1: Kesenjangan data dan Indeks Gender SDG 2024).*

Namun, kita dapat menggunakan data nasional yang terurai dan studi berskala lebih kecil untuk menjelaskan contoh-contoh kekurangan multidimensi yang mungkin disembunyikan oleh rata-rata nasional.

Kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan Pribumi di Kanada

Mengukur skala kekerasan berbasis gender masih sangat menantang, terutama jika dibandingkan secara global. Namun, beberapa negara telah mampu menyelenggarakan survei yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan berbasis gender dalam berbagai situasi dan terhadap perempuan dari berbagai latar belakang.

Kanada adalah salah satu negara yang berfokus pada meningkatkan pengumpulan data tentang GB V. Survei di Kanada pada tahun 2018 mengenai kekerasan berbasis gender di ruang publik dan privat menunjukkan bahwa perempuan dari kelompok Pribumi mengalami tingkat kekerasan pasangan intim dan non-intim yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan non-Pribumi (lihat*Gambar 10*).

Gambar 10.

Kekerasan fisik dan seksual sejak usia 15 tahun per 100 perempuan menurut kelompok identitas Pribumi di Kanada, 2018

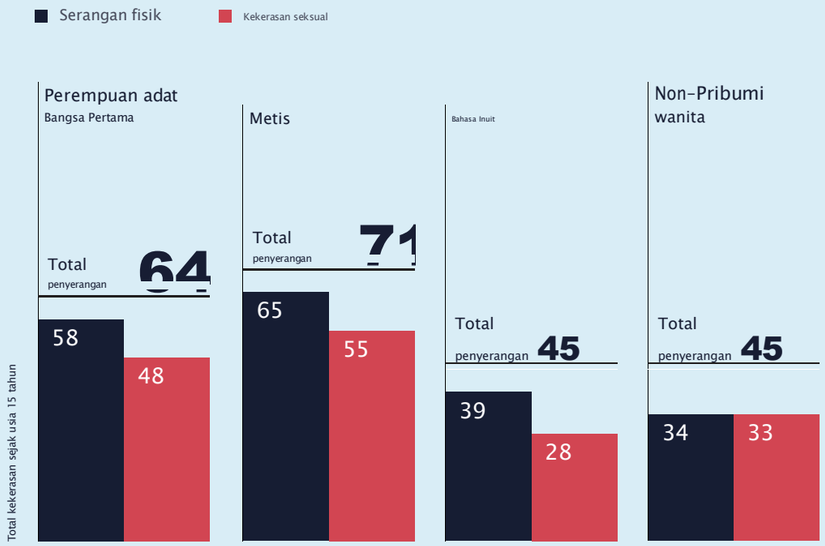

Sumber: Survei Statistik Kanada tentang Keselamatan di Ruang Publik dan Privat, 2018.

Kemiskinan semakin parah kesenjangan gender

Pada tahun 2019, 68 persen anak perempuan di Uganda mengikuti pendidikan prasekolah setahun sebelum memulai sekolah dasar, berbeda dengan 75 persen anak laki-laki. Menggabungkan informasi tentang gender dan kemiskinan menunjukkan kesenjangan yang jauh lebih besar antara anak perempuan dan anak laki-laki: di antara anak-anak dari rumah tangga termiskin, hanya 20 persen anak perempuan yang mengikuti pendidikan prasekolah dibandingkan dengan 60 persen anak laki-laki (lihat *Gambar 11*). Berdasarkan data yang tersedia, Uganda adalah negara dengan perbedaan terkait kekayaan terbesar dalam hal kehadiran di pendidikan pra-sekolah.

Gambar 11.

Ketimpangan tingkat kehadiran di pendidikan prasekolah berdasarkan golongan kekayaan dan gender di Uganda, 2019

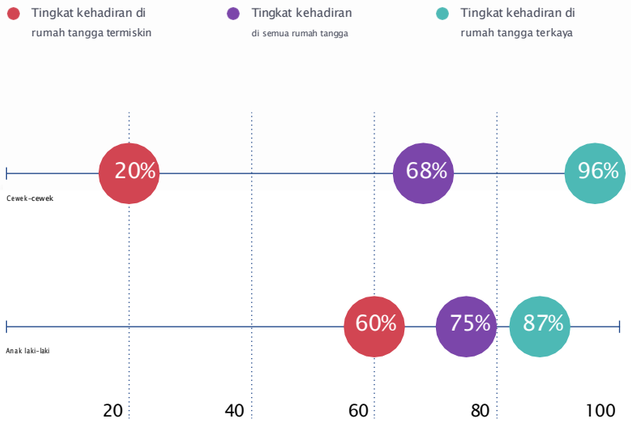

Sumber: Survei Panel Nasional Uganda (2019) melalui Basis Data Ketimpangan Dunia tentang Pendidikan UNESCO.

Wanita muda dengan disabilitas memiliki lebih sedikit kesempatan

Perempuan muda penyandang disabilitas lebih mungkin untuk berada dalam status 'Tidak Bekerja, Pendidikan atau Pelatihan' ('NEET') dibandingkan mereka yang tidak memiliki disabilitas (lihat *Gambar 12*). Di beberapa negara, kesenjangannya sangat besar – di Hungaria dan Rumania tidak ada satu pun kasus perempuan penyandang disabilitas berusia 15 hingga 24 tahun yang terlibat dalam pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan. Di Portugal, perempuan muda penyandang disabilitas empat kali lebih mungkin tidak berpartisipasi dalam pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan. dibandingkan dengan wanita muda tanpa disabilitas.

Gambar 12.

Perempuan muda yang tidak memiliki pekerjaan, pendidikan atau status pelatihan berdasarkan status disabilitas di negara-negara tertentu, 2021

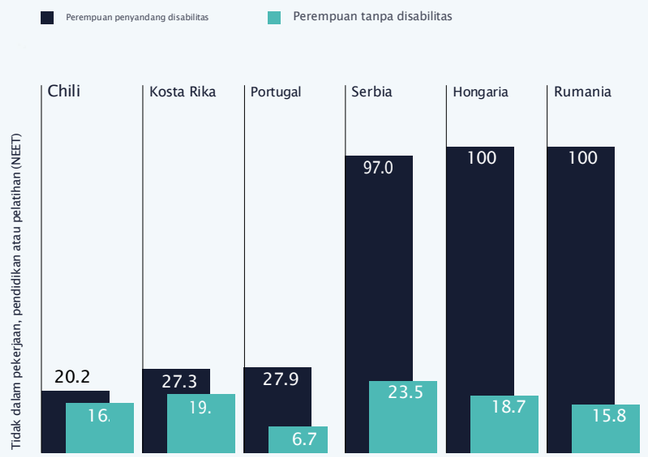

Catatan: Negara-negara yang disajikan mewakili negara-negara dengan tiga tingkat NEET terendah dan tiga tertinggi untuk perempuan muda penyandang disabilitas dalam basis data ILO.

Sumber: basis data ILO.

Masa depan saling berhubungan krisis

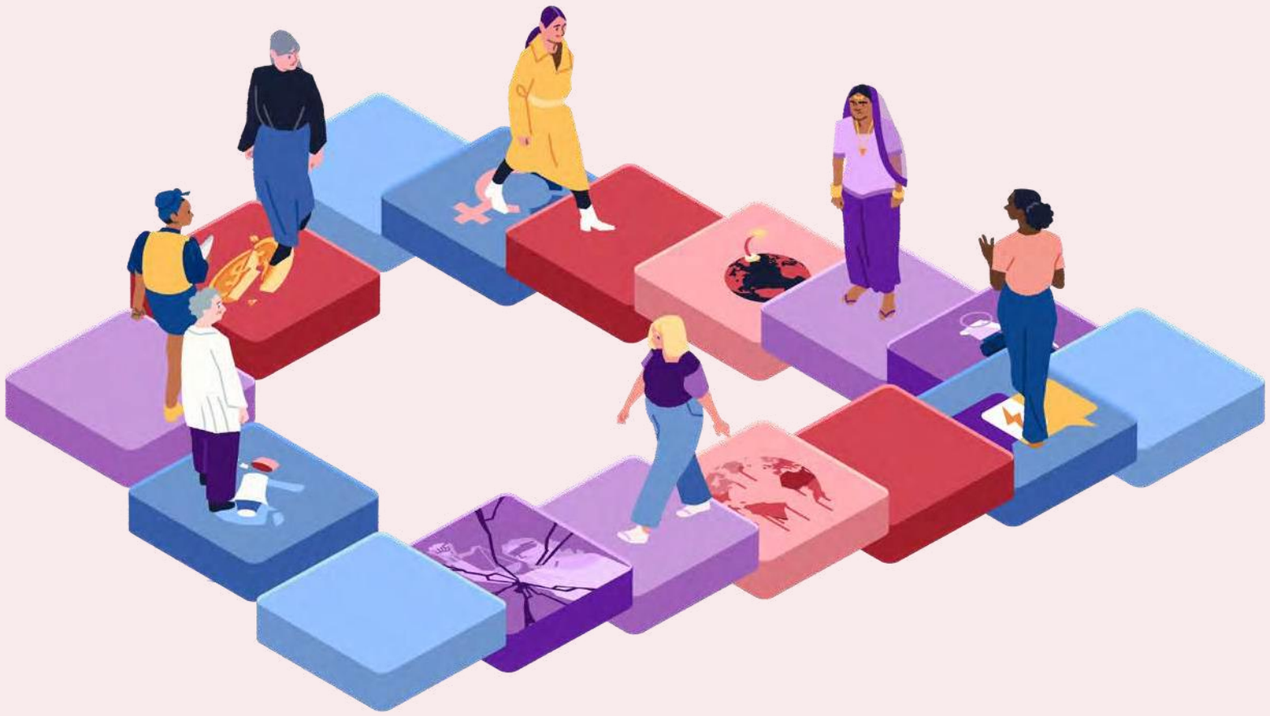

Menghadapi masa depan yang tidak pasti, Pemerintah punya pilihan. Mereka dapat membangun masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan setara dengan berinvestasi pada kesetaraan gender, yang akan membawa kita pada masa depan yang setara gender.

Atau mereka dapat membuat negara mereka semakin rentan dengan gagal menegakkan hak-hak setengah dari populasi mereka, sehingga mengurung kita pada perangkap ketidaksetaraan gender.

Enam tahun ke depan pasti akan membawa lebih banyak tantangan yang dapat menghancurkan kemajuan yang rapuh dalam kesetaraan gender dan mendorong kita mundur.

Berikut ini delapan krisis yang mengancam, yang menjadi perhatian khusus para anggota koalisi EM2030 dan para pejuang gender.

Krisis sumber daya

Transformasi sosial yang dibutuhkan untuk kesetaraan gender memerlukan anggaran yang responsif gender, perpajakan progresif, dan investasi yang kuat dalam layanan publik, serta keadilan dan solidaritas internasional melalui perdagangan yang lebih adil dan aturan pajak, bantuan, hibah, dan pinjaman. Namun, serangkaian pergeseran dan krisis yang saling terkait membuat dana publik tidak mungkin diinvestasikan dalam jenis infrastruktur dan program sosial yang dibutuhkan untuk melindungi dan memajukan kesetaraan gender.

Arus pendanaan internasional

Skor beban utang pemerintah (Ind. 17.2) memburuk lebih parah daripada indikator lain dalam Indeks antara tahun 2019 dan 2022, yang berarti utang pemerintah sebagai bagian dari PDB meningkat tajam. Lebih dari satu dari lima negara berkembang membayar lebih banyak untuk membayar utang mereka pada tahun 2022 daripada yang mereka terima dalam bentuk bantuan dan investasi; angka ini dapat meningkat menjadi lebih dari satu dari tiga pada tahun 2025. Utang publik yang tidak berkelanjutan memiliki dampak negatif pada kesetaraan gender. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa untuk memenuhi pembayaran utang, setidaknya 100 negara harus mengurangi pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, yang akan berdampak secara tidak proporsional pada perempuan dan anak perempuan.

Pada tahun 2024,OECD mencatat bahwa porsi Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) yang secara khusus menargetkan kesetaraan gender telah turun untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Hanya 4 persen dari total bantuan bilateral pada tahun 2021-22 yang mengidentifikasi kesetaraan gender sebagai tujuan utama. ODA adalah semakin banyak disediakan melalui pinjaman lunak , yang selanjutnya berkontribusi pada beban utang.

Peraturan pajak global yang tidak adil juga berarti bahwa negara-negara miskin kehilangan pendapatan pajak yang penting secara tidak proporsional.bergantung pada pajak penghasilan perusahaan dibandingkan negara-negara yang lebih kaya dan kurang terwakili di forum global di mana peraturan pajak ditetapkan. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jugadalam krisis dan negara-negara berkembang adalahkehilangan kepercayaan bahwa lembaga dalam bentuknya saat ini memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada mereka.

Ini adalah tema yang lebih luas dalam arsitektur keuangan internasional. Warisan kolonial terus mendistorsi kekuasaan, dan negara-negara miskin memegang kekuasaan yang jauh lebih sedikit dalam lembaga-lembaga yang mengatur aturan tentang arus pembiayaan internasional. Tekanan-tekanan ini berpadu untuk semakin membatasi sumber daya yang tersedia bagi pemerintah, dan beberapa telah memilih, atau dipaksa melalui pinjaman lunak, untuk mengadopsi langkah-langkah penghematan.

Penghematan

Langkah-langkah penghematan - pemotongan belanja pemerintah yang seringkali menargetkan layanan publik -berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan
Penghematan fiskal dan pemotongan belanja publiksangat merugikan dalam krisis yang berkepanjangan dan kompleks.Sebuah studi tahun 2022 menemukan bahwa 143 negara menerapkan langkah-langkah kebijakan yang melemahkan kapasitas pemerintah untuk menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, perlindungan sosial, dan layanan publik lainnya.

Indeks ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan merasakan dampak dari langkah-langkah penghematan. Dua indikator yang menggambarkan hal ini berasal dari Gallup World Poll (lihat*Pandangan perempuan terhadap isu-isu utama semakin memburuk*). Pandangan perempuan terhadap biaya pangan (Ind. 2.4) dan kenyamanan terhadap pendapatan rumah tangga mereka (Ind. 1.4) keduanya memburuk secara signifikan antara tahun 2019 dan 2022, dengan penurunan skor pada setiap indikator di lebih dari 57 persen negara.

Krisis demokrasi

Kesetaraan gender terkait erat dengan demokrasi: keduanyakonsekuensi dari demokrasi yang lebih besar dan kekuatan yang berkontribusi terhadap peningkatan demokratisasi . Namun, fondasi demokrasi di seluruh dunia terancam karena meningkatnya ketimpangan ekonomi, polarisasi sosial dan politik, serta tertutupnya ruang sipil. Kemajuan dalam kesetaraan gender akan terhambat karena demokrasi melemah. Di sisi lain, pendekatan yang mempromosikan kesetaraan gender akan membantu menyegarkan demokrasi.

Meningkatnya kesenjangan ekonomi

Ketimpangan ekonomitelah ditemukan memiliki konsekuensi serius terhadap kesetaraan politik, stabilitas pemerintahan, dan apakah individu mendukung demokrasi itu sendiri. Pada tahun 2022,10 persen dari populasi dunia memiliki 76 persen kekayaan dunia Melihat Indeks tersebut, ketimpangan pendapatan (Ind. 10.1) mengalami stagnasi atau memburuk di tiga perempat negara antara tahun 2019 dan 2022; 10 negara yang skornya paling memburuk adalah Malta, Belanda, Estonia, Mali, Finlandia, Lithuania, Portugal, Swedia, Norwegia, dan Kolombia.

Ketimpangan ekonomi memusatkan kekuasaan - termasuk kekuasaan politik - di tangan kaum elit yang kaya. Kekuasaan yang datang bersama kekayaan tersebut membantu kaum kaya untuk mengatur aturan - termasuk aturan pajak, aturan persaingan dan monopoli, dan kepemilikan media - demi kepentingan mereka, yang berujung pada ketimpangan ekonomi yang lebih parah. Negara-negara demokrasi yang 'dikuasai' dengan cara ini tidak akan membuat undang-undang dan keputusan anggaran dengan mempertimbangkan hak-hak perempuan dan anak perempuan - apalagi perempuan dan anak perempuan yang paling terpinggirkan.

Negara-negara dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi juga ditemukan memilikipolarisasi sikap yang lebih besar tentang kesetaraan, keadilan sosial, dan keyakinan pada proses dan cita-cita demokrasi.

Ketimpangan ekonomi memusatkan kekuasaan – termasuk kekuasaan politik – di tangan kaum elit yang kaya.

Polarisasi sosial dan politik

Polarisasi politik dan sosial mempersulit demokrasi untuk berfungsi dengan mengurangi rasa nilai-nilai bersama dan kepercayaan terhadap lembaga. Munculnya pemerintahan sayap kanan, nasionalis, populis, dan antidemokrasi membawa sertaMeningkatnya anti-feminisme , dan jugadampak langsung dan nyata tentang hukum, kebijakan, dan investasi dalam hak-hak perempuan dan anak perempuan terhadap kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi.

Yang mengkhawatirkan, kesenjangan antara nilai-nilai yang dianut oleh pemuda dan pemudi juga semakin besar: data survei dari beberapa negara seperti Tiongkok, Jerman, Polandia, Korea Selatan, Tunisia, Amerika Serikat, dan Inggris menunjukkan bahwaPandangan perempuan muda tentang isu-isu sosial utama - seperti kesetaraan gender - cenderung jauh lebih progresif dibandingkan dengan kaum muda.

Ruang sipil dan represi

Laporan Freedom House tahun 2024 menemukan bahwa kebebasan global menurun selama 18 tahun berturut-turut, dengan mengkatalogkan contoh-contoh manipulasi pemilu, pelarangan partai politik, dan misinformasi di berbagai negara. Pada tahun 2023, CIVICUS menemukan bahwahanya 3,2 persen penduduk yang tinggal di negara dengan ruang publik terbuka , dan hampir sepertiganya tinggal di negara-negara dengan ruang sipil 'tertutup': di mana hak untuk berkumpul, berserikat, dan berekspresi secara damai dibatasi.

Indeks menunjukkan bahwa 91 dari 139 negara dinilai 'buruk' atau 'sangat buruk' dalam penilaian ahli tentang apakah negara tersebut melindungi 'otonomi pribadi, hak individu, dan kebebasan dari diskriminasi' (Ind. 10.2) pada tahun 2022.

Indeks tersebut juga menunjukkan bahwa, secara global, hak perempuan untuk membahas isu politik secara terbuka, baik di ruang pribadi maupun publik (Ind. 10.4) mengalami penurunan yang konsisten dari tahun 2015 hingga 2022, terbukti di semua kawasan, dengan Asia dan Pasifik mengalami kemunduran paling signifikan, diikuti oleh Amerika Latin dan Karibia.

“Kemenangan kelompok populis nasionalis yang bersekutu dengan partai konservatif merupakan tantangan yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan kelompok minoritas serta penegakan demokrasi [di Indonesia].”

– KAPAL Perempuan, Indonesia

Krisis keamanan dan keselamatan

Konsep 'keselamatan dan keamanan' sering kali hanya dilihat melalui lensa konflik kekerasan dan militerisasi, dan keduanya memang sedang meningkat. Namun, keselamatan dan keamanan bagi perempuan dan anak perempuan juga lebih bersifat pribadi dan lebih eksistensial daripada itu. Bagi perempuan, anak perempuan, dan orang-orang yang memiliki gender ekspansif, tubuh mereka sendiri sedang diserang, dengan kekerasan berbasis gender yang menyebar luas di setiap wilayah dan serangan patriarki terhadap kesehatan dan hak seksual dan reproduksi mereka meningkat. Pada saat yang sama, darurat iklim merupakan ancaman langsung dan jangka panjang bagi kehidupan dan mata pencaharian semua orang, terutama perempuan dan anak perempuan serta mereka yang memiliki identitas yang secara historis terpinggirkan.

Otonomi tubuh dan kekerasan berbasis gender

Lebih dari sepertiga wanita di seluruh dunia diperkirakan pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Secara global, pada tahun 2022, hanya lebih dari separuh (57 persen) perempuan di 139 negara yang mengatakan bahwa mereka merasa aman berjalan di lingkungan mereka pada malam hari (Ind. 16.3).

Selama krisis, angka-angka yang sudah mencolok ini memburuk karena norma-norma gender yang mengakar terungkap dan diperburuk. Pada tahun 2021,Studi PBB Perempuan di 13 negara ditemukan bahwa 50 persen perempuan melaporkan bahwa mereka atau perempuan yang mereka kenal mengalami bentuk kekerasan selama pandemi. Di semua keadaan darurat kemanusiaan dan situasi konflik perempuan dan anak perempuan sangat rentan , menghadapi peningkatan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, kematian ibu, perkawinan anak dan bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender lainnya.

"Menyediakan sumber daya feminis

organisasi tetap penting untuk mempertahankan kesetaraan gender, serta kesehatan dan hak seksual dan reproduksi (SRHRJ) untuk semua dalam konteks saat ini yang dilandasi oleh meningkatnya anti-gender dan anti hak asasi manusia."

– Sai Racherla, Wakil Direktur Eksekutif, Pusat Sumber Daya dan Penelitian Perempuan Asia-Pasifik (ARROW)

Pada saat yang sama, tubuh perempuan semakin diinstrumentalisasi dan dipolitisasi, yang bertujuan untuk membatasi otonomi tubuh mereka.Meningkatnya konservatisme dalam banyak konteks telah menghidupkan kembali patriarki dan peran gender tradisional , membingkai feminisme, istilah 'gender', identitas yang memperluas gender, dan hak seksual dan reproduksi sebagai ancaman terhadap unit keluarga dan masyarakat luas. Para pendukung ideologi ini semakin aktif di ruang multilateral, menimbulkan ancaman serius terhadap komitmen yang telah disepakati sebelumnya terhadap otonomi tubuh dan terhadap kemajuan yang dibuat untuk memastikan akses yang aman dan legal terhadap aborsi dan perlindungan bagi kelompok yang memperluas gender.

Bagi perempuan, anak perempuan, dan orang-orang yang menganut paham ekspansi gender, krisis keselamatan dan keamanan lebih mengutamakan tubuh, pilihan, dan keselamatan pribadi mereka.

Konflik

TerbaruIndeks Perdamaian Global menunjukkan bahwa jumlah korban tewas akibat konflik pada tahun 2023 adalah yang tertinggi di abad ini. Pada saat yang sama, secara global, pengeluaran militer (Ind. 17.1) meningkat sebagai bagian dari PDB antara tahun 2019 dan 2022, meskipun keterbatasan fiskal menjadi alasan untuklangkah-langkah penghematan di sebagian besar negara di dunia (melihat*Krisis sumber daya: Penghematan*).

Selain peningkatan pengeluaran militer, ada jugapeningkatan konflik bersenjata yang terus-menerus sejak tahun 2010 , berlanjut hingga tahun 2024. Jumlah perempuan dan anak perempuan yang tinggal di negara-negara yang terkena dampak konflik mencapai 614 juta pada tahun 2022, 50 persen lebih tinggi dibandingkan jumlah pada tahun 2017. Dari 10 negara terbawah dalam Indeks, semuanyadipertimbangkan oleh OECD dianggap 'Rapuh' dan enam dianggap 'Sangat Rapuh' (Afghanistan, Chad, DR Kongo, Burundi, Kongo, dan Haiti). Bukti substansial dari konflik yang sedang berlangsung terus menerus mengungkap berbagai tantangan besar yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan, termasuk hambatan terhadap akses aman terhadap air, makanan, bahan bakar, dan tempat tinggal, meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender, dan menurunnya akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan ruang aman, selain dari hancurnya struktur masyarakat dan struktur pendukung.

Meskipun terdapat banyak bukti bahwa partisipasi perempuan dapat mendorong demokrasi yang lebih kuat dan perdamaian yang lebih langgeng, namun perempuan masih belum mampu mencapai tujuan mereka. menghadapi kendala yang mendalam terhadap partisipasi langsung dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian ; dari 18 perjanjian perdamaian yang dicapai pada tahun 2022, hanya enam yang memuat ketentuan khusus yang berkaitan dengan perempuan, anak perempuan, atau gender.

"Pemerintah Kolombia, dalam komitmennya terhadap perdamaian di Kolombia, menetapkan kebijakan Perdamaian Total, dengan membuka enam proses negosiasi dengan aktor-aktor bersenjata. Ini adalah tugas yang sulit, terutama karena tidak ada bukti kemauan politik dari kelompok-kelompok bersenjata ini untuk menghentikan permusuhan. Namun, perempuan, melalui berbagai ekspresi sosial – seperti mobilisasi damai dan feminis – mempertahankan tuntutan mereka untuk diakhirinya konflik dan dibangunnya perdamaian."

– Shidhjmatnj Pardo, Koordinator Program, Ruta Pacífica de las Mujeres

Darurat iklim

Sekretaris Jenderal PBB baru-baru ini memperingatkan bahwa kita sedang berada pada "jalan raya menuju neraka iklim ," saat dunia mengalami serangkaian suhu yang memecahkan rekor. Perempuan, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan/atau merupakan anggota masyarakat Pribumi atau Kulit Hitam,terkena dampak perubahan iklim secara tidak proporsional PBB memperkirakan bahwa80 persen dari orang yang mengungsi akibat perubahan iklim adalah perempuan dan anak perempuan .

Perubahan iklim diperkirakan akan memaksa 101 juta orang – lebih banyak perempuan daripada laki-laki -menuju kerawanan pangan pada tahun 2030 Bahkan saat ini, dunia sudah menghadapi krisis pangan dan gizi yang sebagian disebabkan oleh perubahan iklim: lebih dari 900.000 orang di seluruh dunia saat ini hidup dalam kondisi seperti kelaparan, 10 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2017 .

Dalam Indeks, pandangan perempuan tentang kebijakan lingkungan (Ind 13.2) menunjukkan ketidakpuasan dengan upaya saat ini untuk melestarikan lingkungan: 93 negara dari 139 negara memiliki skor 'sangat buruk' untuk indikator ini pada tahun 2022.

Meskipun mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh dampak perubahan iklim, perempuan dan anak perempuan juga merupakan agen perubahan utama dalam upaya adaptasi dan mitigasi iklim. hanya kelompok kehutanan masyarakat , misalnya, memiliki hasil yang lebih baik dalam meregenerasi hutan. Namun, perempuanjarang masuk dalam jajaran teratas dunia tabel pengambilan keputusan terkait iklim. Indeks tersebut menunjukkan bahwa 48 negara dari 137 negara masih memiliki skor 'sangat buruk' untuk sejauh mana delegasi negara mereka di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) memiliki keseimbangan gender (Ind. 13.1).

Negara-negara kaya memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan negara-negara miskin dalam mengambil tindakan untuk mengatasi darurat iklim: mereka menggunakanenam kali lebih banyak sumber daya dan menghasilkan dampak iklim 10 kali lebih besar dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan rendah. Namun, janji terbaru mereka pada konferensi iklim PBB 2023 mencakup hanya 0,2 persen kerugian yang dihadapi negara berkembang akibat perubahan iklim setiap tahunnya.

"Kita harus berhenti menyalahkan krisis iklim pada tubuh anak perempuan dan perempuan di negara-negara berpendapatan rendah. Masalah sebenarnya adalah konsumsi berlebihan dan ketergantungan pada bahan bakar fosil di negara-negara berpendapatan tinggi. Sudah saatnya negara-negara ini mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas krisis iklim."

– Dr. Maliha Khan, Presiden dan CEO, Women Deliver

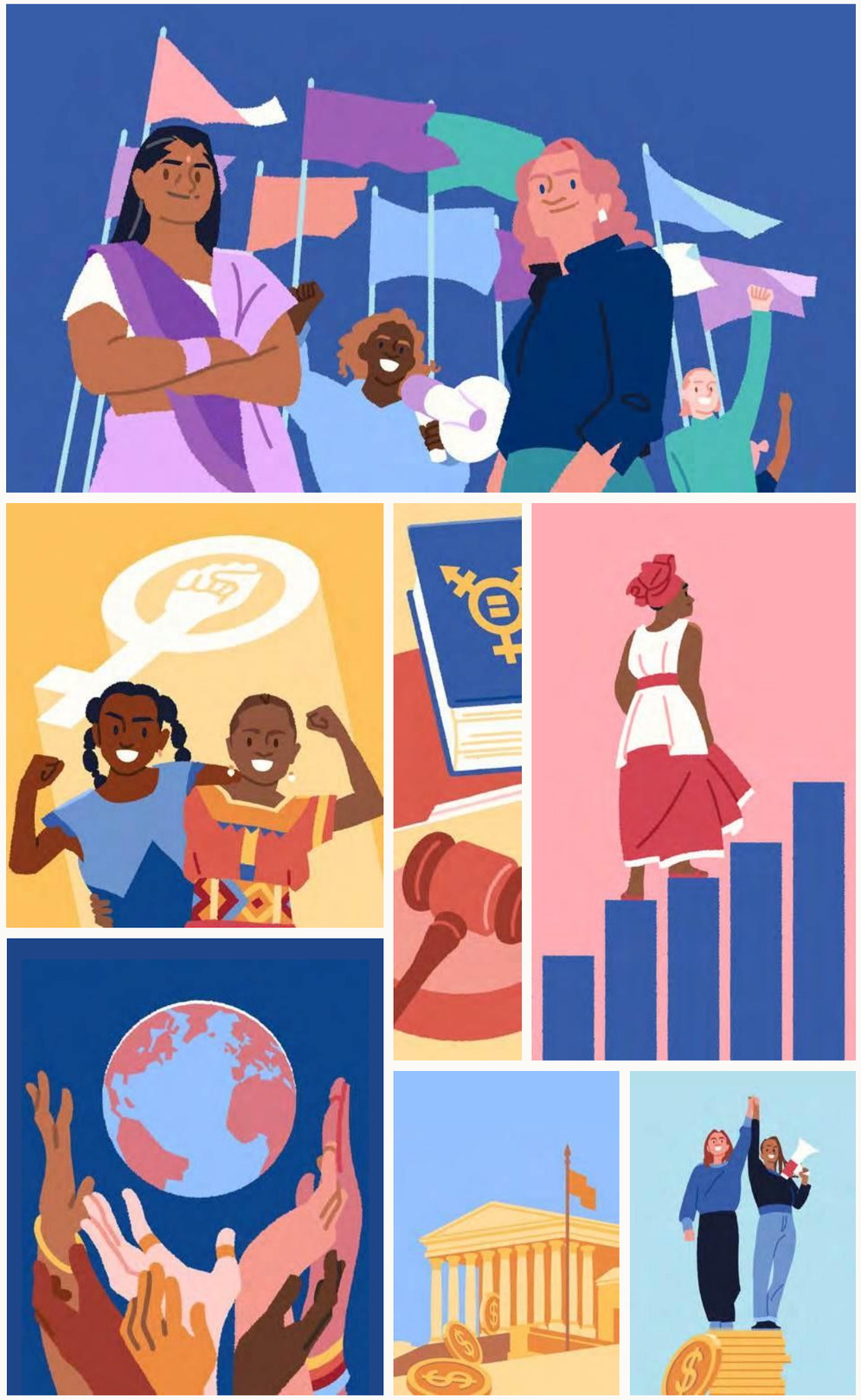

Sebuah cetak biru untuk

pemerintahan: maju

kesetaraan genderdi dalam

menghadapi krisis

Meskipun Indeks ini menunjukkan kemajuan yang telah terjadi dan yang belum terjadi, namun Indeks ini juga menyoroti tema-tema lintas sektor yang muncul di negara-negara dan kawasan yang sedang mengalami kemajuan. Mengacu pada tema-tema ini dan pengalaman koalisi Equal Measures 2030, kami menguraikan tujuh rekomendasi yang, jika diambil bersama,**menyediakan cetak biru bagi pemerintah untuk melindungi dan memajukan kesetaraan gender bagi perempuan, anak perempuan, dan masyarakat yang memiliki kesetaraan gender dalam segala keragamannya**, berkontribusi pada ketahanan dan masyarakat yang sejahtera dalam menghadapi krisis global.

Halaman 01

Meningkatkan kepemimpinan, kekuatan, dan suara perempuan dan anak perempuan

Keterlibatan perempuan dan anak perempuan dalam kehidupan publik bukan hanya merupakan hak asasi manusia yang utama, tetapi juga penting bagi kesehatan sosial dan ekonomi suatu negara. Penelitian menunjukkan bahwaMeningkatkan kehadiran perempuan di parlemen dapat mengurangi polarisasi , meredakan permusuhan antara partai politik dan membantu meningkatkan rasa percaya terhadap politisi. Namun norma gender tentang kepemimpinan, serta kemiskinan, beban perawatan, dan kekerasan terhadap tokoh masyarakat perempuan, sering kali mengecualikan perempuan dan anak perempuan dari ruang pengambilan keputusan.

Secara global, Indeks menunjukkan peningkatan yang stabil pada proporsi perempuan yang terwakili di parlemen (Ind. 5.4), dengan hampir setengah (48 persen) negara membuat 'kemajuan cepat' antara tahun 2019 dan 2022. Jumlah negara dengan setidaknya 35 persen representasi perempuan di parlemen meningkat dari hanya 23 pada tahun 2015 menjadi 39 pada tahun 2022. Meskipun ini merupakan kemajuan penting, hanya 12 dari 139 negara (8,6 persen) yang telah mencapai paritas gender di parlemen mereka pada tahun 2022.

Sementara itu, representasi perempuan dalam jabatan menteri dan jabatan senior pemerintah (Ind. 5.5) masih rendah, meskipun ada perbaikan sejak tahun 2015. Sembilan puluh satu negara dari 139 negara masih memiliki tingkat representasi perempuan yang 'sangat buruk'. skor pada indikator ini, artinya kurang dari 30 persen peran senior di pemerintahan dipegang oleh perempuan di negara-negara tersebut pada tahun 2022.

"Pemerintah Bernardo Arévalo, dalam upaya menyelamatkan kesetaraan gender dalam posisi pengambilan keputusan dan meningkatkan kepemimpinan perempuan, menunjuk 10 perempuan dari 22 gubernur departemen pada bulan April 2024, posisi penting yang mewakili presiden sendiri di departemen."

– Danessa Luna, Direktur Eksekutif, Asociación de Mujeres Generando Equidad, Liderazgo y Oportunidades (ASOGEN)

Perempuan dan anak perempuan – khususnya mereka yang berasal dari latar belakang dan identitas rasial atau terpinggirkan – terus menghadapi hambatan signifikan dalam memegang peran kepemimpinan dalam komunitas, sekolah, bisnis, dan ruang politik, serta dalam mengklaim dan memegang kekuasaan nyata begitu mereka berada di sana.

Halaman 02

Mereformasi dan menerapkan hukum dan kebijakan kesetaraan

Definisi dan perlindungan kesetaraan gender dalam hukum merupakan langkah penting menuju tercapainya kesetaraan gender dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Misalnya, memastikan perempuan memiliki hak hukum yang sama untuk memiliki tanah dan properti (Ind. 1.3) akan meningkatkan ketahanan pangan Proses pengadopsian dan/atau reformasi undang-undang kesetaraan dapat melibatkan masyarakat sipil, pemerintah, pembuat undang-undang, dan masyarakat luas dalam perdebatan dan penetapan norma, sehingga menciptakan tekanan untuk akuntabilitas.

Sementara perjuangan untuk mereformasi undang-undang yang diskriminatif dapat memakan waktu puluhan tahun, indikator yang menangkap atau mencerminkan landasan hukum untuk kesetaraan gender juga dapat menunjukkan perubahan yang cepat. Mengenai luasnya dasar hukum untuk aborsi (Ind. 5.3), enam negara lainnya menerima skor 100 sejak 2019; pada 2022, aborsi secara umum legal di 45 persen negara. Antara 2019-2022, 29 dari 139 negara membuat 'kemajuan cepat' terkait undang-undang yang mendekriminalisasi, melindungi, atau mengakui 'orientasi seksual dan perilaku sesama jenis' (Ind. 10.5);

Meskipun ada perbaikan ini, 87 negara di seluruh tingkat pendapatan dan wilayah masih mendapat skor 'sangat buruk' pada indikator ini pada tahun 2022. Pada saat yang sama, kita melihat bahwa perlindungan hukum bisa rentan terhadap pembatalan yang cepat , seperti yang terlihat baru-baru ini di Afghanistan, Argentina, Cina, Polandia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Meskipun perlindungan hukum untuk kesetaraan gender telah maju, para pendukung menyoroti bahwa hukum terbaik sekalipun tidak cukup. Reformasi hukum dan perubahan kebijakan perlu didukung oleh anggaran dan kemauan politik untuk pelaksanaannya, di samping upaya transformasi sosial untuk mengubah norma-norma yang merugikan di tingkat individu dan antarpribadi.

Halaman 03

Mempromosikan 'feminisme data' dan menutup kesenjangan data yang sensitif gender

Feminisme data melibatkan pengakuan terhadap ketidakseimbangan kekuatan dan warisan kolonial yang tertanam dalam sistem statistik , praktik, dan lembaga. Hal ini dapat dilihat ketika mempertimbangkan data mana yang diprioritaskan,tertindas atautidak pernah dikoleksi (melihat*Kotak 1: Kesenjangan data dan Indeks Gender SDG 2024*). Hal ini dapat dilihat dari cara data dan teknologi baru – termasukRevolusi AI – mereplikasi ketidaksetaraan dan bias yang ada. Hal ini dapat dilihat dari profil orang-orang yangmemegang kekuasaan dan telah mengekstraksikekayaan pribadi yang sangat besar dari 'ekonomi data.'

Sementara feminisme data berkaitan dengan setiap langkah rantai nilai data, mempromosikan data yang lebih banyak dan lebih baik yang peka terhadap gender merupakan prioritas utama yang telah mengalami kemajuan terkini. Sejak 2019, 61 persen negara telah membuat 'kemajuan cepat' menuju statistik yang lebih terpilah (Ind. 17.4).

Meskipun ada perbaikan seperti yang ditunjukkan pada Pengawasan Data Terbuka*Kompas Gender* , banyak negara masih kekurangan sumber daya dan kapasitas yang diperlukan untuk menanggapi permintaan data, dan kesenjangan yang signifikan dalam cakupan geografis, ketepatan waktu, dan disagregasi masih ada. Anggaran nasional untuk data dan statistik rendah, dan sekitar 40 persen kantor statistik nasional mengalami penurunan pendanaan selama pandemi .

Hanya21 dari 32 indikator resmi SDG yang memerlukan pemisahan jenis kelamin memiliki data terkini yang tersedia untuk sebagian besar negara, dan untuk delapan indikator tidak tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin sama sekali.

Menutup kesenjangan data yang sensitif gender sangat penting untuk memantau kebijakan dan menginformasikan keputusan para pembuat kebijakan. Namun, kita juga harus melangkah lebih jauh dengan melibatkan pengguna data (terutama organisasi dan gerakan feminis) sebagai pemilik, produsen, dan penasihat data. Ini akan memastikan bahwa data dapat digunakan untuk melihat dengan jelas dan mengubah - bukan memperkuat - ketidakadilan kekuasaan di masa lalu.

“Dalam menghadapi krisis global yang saling terkait,Masa depan bersama kita menuntut kemajuan nyata—dan data gender dapat memberikannya.Dengan melakukan upaya bersama untuk menutup kesenjangan data gender, pemerintah dapat lebih baik
memahami realitas kehidupan warga negaranya dan pada akhirnya mempercepat kesetaraan gender."

- Krista Jones Baptista,
Direktur Eksekutif, Data2X

"Data adalah kekuatan. Data feminis dan gender terus mengubah jenis data dan cara data tersebut diproduksi, dianalisis, dan digunakan.Saat ini, perempuan dan anak perempuan akar rumput di Kenya tengah merebut kembali peran mereka sebagai produsen, analis, dan pengguna data."

- Rachel Kagoiya, Direktur Eksekutif,
GROOTS Kenya

Nomor telepon 04

Meningkatkan sumber daya dan investasi dalam layanan publik dan infrastruktur sosial, termasuk perawatan

Perpajakan progresif dan investasi dalam perlindungan sosial, layanan publik dan infrastruktur - termasuk layanan perawatan - diperlukan untuk mendanai transformasi sosial demi kesetaraan gender.

Di sisi pendapatan, kita tahu bahwaSistem perpajakan di seluruh dunia mengandung dan dapat memperkuat bias gender Sistem pajak yang dirancang dengan baik bisa lebih adil dan berkontribusi
untuk pertumbuhan ekonomi; misalnya,

Apajak penghasilan progresif dapat meningkatkan kekuatan ekonomi perempuan berpenghasilan rendah , terutama dengan perlakuan pajak yang lunak, atau subsidi untuk, pengeluaran seperti pengasuhan anak.

Di sisi pengeluaran, investasi dalam sistem perlindungan sosial yang tepat sasaran, seperti pengasuhan anak yang didukung negara, tunjangan cuti orang tua, dan pensiun, sangat penting untuk menutup kesenjangan gender dan dapat meningkatkan lapangan kerja pria dan wanita. Penelitian di tujuh negara menunjukkan bahwa investasi sebesar 2 persen dari PDB pada ekonomi perawatan akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki hampir sama banyaknya dengan investasi pada industri konstruksi dan akan menciptakan hingga empat kali lebih banyak lapangan pekerjaan bagi perempuan.

Perempuan - khususnya mereka yang memiliki identitas terpinggirkan secara historis - juga cenderung lebih bergantung pada layanan publik dan perlindungan sosial karena beban perawatan yang lebih tinggi dan kemungkinan lebih besar untuk terdampak.pekerjaan bergaji rendah, informal, dan rentan Wanita adalahlebih mungkin menjadi 'pekerja keluarga yang berkontribusi' (Ind. 8.2), yang berarti mereka menyediakan tenaga kerja penting tetapi tidak menerima upah tetap atau membuat keputusan utama tentang bisnis keluarga mereka. 'Pekerja keluarga yang berkontribusi' melakukan beberapa jenis pekerjaan informal yang paling tidak terlindungi dan tidak terlihat. Secara global,28 persen wanita dalam pekerjaan informal adalah 'pekerja keluarga yang berkontribusi' dibandingkan dengan hanya 9 persen laki-laki.

Pada saat yang sama, semakin sulit bagi perempuan untuk menuntut upah dan kondisi yang lebih baik di tempat kerja karena ruang untuk berserikat dan aksi kolektif semakin memburuk atau mandek. Antara tahun 2019 dan 2022, hak tawar-menawar kolektif (Ind. 8.3) memburuk di 30 negara dan tetap sama di 89 negara lainnya.

"Sistem publik yang kuat dan pembiayaan transformatif gender merupakan landasan untuk mencapai kesetaraan gender.Sekaranglah saatnya untuk investasi besar-besaran dalam ekonomi perawatan!"

- Nilangi Sardeshpande,
Pimpinan Proyek, SAHAJ

Tanggal 05.

Mengenali dan menanggapi kebutuhan unik dan tahap kehidupan remaja putri dan perempuan muda

Hampir 75 persen remaja putri dan wanita muda berusia 10-24 tahun tinggal di negara-negara dengan skor 'miskin' dan 'sangat miskin' pada Indeks Gender SDG. Banyak dari mereka menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan hak-hak mereka selama tahap kehidupan yang penting ini.

Buktinya jelas - ketika hak-hak anak perempuan terwujud, masyarakat akan berkembang. Perempuan muda yang berpendidikan lebih mampumenunda kehamilan dan menjamin kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka Jika setiap anak perempuan di seluruh dunia mendapatkan pendidikan gratis, aman, dan berkualitas selama 12 tahun, maka perempuan akan mendapatkan penghasilan seumur hidup dapat meningkat sebesar $15 triliun hingga $30 triliun secara global .

Indeks Gender SDG menyoroti berbagai isu yang khususnya memengaruhi anak perempuan dan perempuan muda. Hampir semua negara (121 dari 139) memiliki skor 'sangat baik' atau 'baik' dalam hal angka pernikahan dini, pernikahan paksa, dan pernikahan anak (Ind. 5.1), dengan 50 negara menunjukkan 'kemajuan cepat' antara tahun 2019 dan 2022. Namun, satu dari tiga negara memiliki skor 'buruk' atau 'sangat buruk' dalam hal angka kelahiran remaja (Ind. 3.2), dan 59 dari 136 negara juga memiliki skor 'buruk' atau 'sangat buruk' dalam kaitannya dengan akses perempuan terhadap metode kontrasepsi modern (Ind. 3.3).

Kurangnya data yang dipilah berdasarkan usia berarti bahwa pengalaman dan kebutuhan unik remaja putri dapat menjadi tidak terlihat dan terabaikan. Hal ini terbukti dalam bidang-bidang seperti pekerjaan perawatan.di mana anak perempuan sering kali melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga , atau sistem kesehatan di mana layanan untuk anak perempuan mungkin jarang .

Pengalaman dan kesempatan dalam tahap kehidupan yang unik ini dapat menentukan masa depan secara keseluruhan. Gadis remaja dan wanita muda membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk membantu membentuk norma, kebijakan, dan program yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan perwujudan hak-hak mereka.

“Data yang disediakan dalam Indeks harus ada seruan mendesak untuk bertindak guna mengakui dan menanggapi kebutuhan unik gadis remaja dan wanita muda. Buktinya adalah jelas – ketika hak-hak anak perempuan terwujud, semua orang menang."

– Kathleen Sherwin, Kepala Strategi & Keterlibatan Petugas, Plan International

Halaman 06

Berinvestasilah dan ciptakan ruang untuk gerakan feminis.

organisasi dan gerakan

Terdapat korelasi yang jelas antara keberadaan gerakan feminis yang kuat dan kemajuan menuju kesetaraan gender. Mobilisasi feminis ditemukan sebagai faktor yang paling penting dalam mengamankan tindakan terhadap kekerasan terhadap perempuan. perempuan di tingkat nasional Dampak gerakan feminisme melampaui gender kesetaraan: advokasi feminis menghadapi diskriminasi, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia, yang pada gilirannya mengatasi isu-isu lintas sektor seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik.

Gerakan-gerakan ini melakukan pekerjaan penting ini meskipun akses pendanaan terbatas, dengan gerakan feminis kulit hitam, LGBTQIA, dan pemuda, Pribumi, migran, dan seks organisasi yang dipimpin oleh pekerja bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menerima pendanaan fleksibel, inti, atau multi-tahun. Perhitungan EM2030 menggunakan data baru dari OECD menunjukkan bahwa hanya 0,7 persen dari seluruh bantuan terkait gender yang mencapai organisasi hak-hak perempuan pada tahun 2021-22 ($453 juta dari $64,1 miliar).

Organisasi dan gerakan feminis dipengaruhi oleh tren yang lebih luas yang memengaruhi ruang sipil. Mereka telah terkena dampak buruk di negara-negara yangRuang bagi operasi masyarakat sipil dan LSM semakin menyempit Hampir setengah dari negara (68 dari 139) mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2022 terkait sejauh mana perempuan dapat “membahas isu politik di ruang privat dan publik” (Ind. 10.4).

Untuk mendukung demokrasi yang sehat dan berfungsi, ruang sipil harus dilindungi sehingga masyarakat sipil, khususnya gerakan feminis interseksional yang melawan penindasan lintas isu dan konstituen, dapat berkembang. Diperlukan investasi yang lebih banyak dan lebih baik dalam gerakan feminis untuk memungkinkan solidaritas dan tindakan lintas gerakan yang berkelanjutan guna mencapai kesetaraan bagi semua.

Tanggal 07.

Pusat Kesetaraan Gender

dan keadilan di inti solidaritas dan kerjasama internasional

Keadilan internasional, kerja sama, dan solidaritas di berbagai bidang mulai dari G20 hingga COP hingga PBB merupakan prasyarat bagi kemajuan berkelanjutan di seluruh dunia dalam hal kesetaraan gender dalam menghadapi krisis lintas batas yang saling terkait. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hal-hal tersebut kurang tersedia.

Konsensus dalam pengambilan keputusan global telah menurun secara signifikan selama abad ini. Dalam negosiasi perjanjian pandemi baru-baru ini, Amerika Serikat dan Uni Eropa menentang semua gagasan yang diajukan oleh negara-negara berkembang untuk memperkuat kerja sama internasional dan kesetaraan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Para pendukung di

"Gerakan feminis memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong perubahan dan melawan penindasan.Namun, pengalaman pelatihan alumni Pembela HAM Perempuan di 19 provinsi di Indonesia menyoroti bahwa mereka menghadapi risiko mulai dari ancaman, diskriminasi, pengucilan, hingga kekerasan fisik dan seksual. Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan anggaran yang memadai."

– KAPAL Perempuan, Indonesia

Komisi PBB tentang Status Perempuan pada tahun 2024 melaporkan penolakan signifikan terhadap teks yang 'ekspansif gender', dengan beberapa Negara Anggota menantang bahasa yang telah lama diterima.

Kita perlu kolaborasi berkelanjutan di ruang multilateral lintas pemerintah untuk mendengarkan berbagai masyarakat sipil feminis dan bersekutu guna melindungi komitmen kesetaraan gender dari upaya para pelaku anti-hak asasi manusia. Kita perlu pemerintah – seperti mereka yang berupaya mewujudkan kebijakan luar negeri yang benar-benar feminis – yang lantang dan bangga dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dan anak perempuan, bahkan dalam negosiasi dan ruang yang tampaknya tidak terkait tentang pajak, perdagangan, iklim, demokrasi, konflik, dan reformasi kelembagaan global.

Kita perlu bantuan, pinjaman, dan hibah yang terstruktur sedemikian rupa sehingga memungkinkan dan mendorong pemerintah untuk berinvestasi dalam kesetaraan gender dan program serta kebijakan yang melindunginya. Kita perlu pemerintah donor untuk memprioritaskan kesetaraan gender sebagai hasil utama dalam bantuan mereka dan, yang terpenting, untuk mengarahkan lebih banyak dan lebih baik pendanaan langsung ke masyarakat sipil feminis yang memainkan peran besar dalam melindungi dan memajukan kesetaraan gender dalam jangka panjang dalam semua konteks.

Lampiran 1:

Indikator indeks, target, dan sumber data

Tabel ini menyajikan 56 indikator yang menyusun Indeks Gender SDG yang dikelompokkan berdasarkan SDG. Tabel ini memuat informasi berikut:

Referensi: Nomor referensi yang digunakan di seluruh dokumen ini untuk menyoroti indikator tertentu.

Nama indikator: Nama indikator lengkap dan kelompok populasi yang relevan.

Target: Target mengacu pada definisi pencapaian (=100 poin) untuk setiap indikator. Beberapa didefinisikan dalam kerangka SDG resmi dan yang lainnya didasarkan pada inklusi penuh atau pada pencapaian rata-rata negara-negara dengan kinerja terbaik.

Sumber data: Sumber data asli untuk sebagian besar indikator dalam Indeks Gender SDG adalah otoritas statistik nasional yang relevan di suatu negara. Mereka melaporkan data kepada penjaga data SDG internasional (seperti badan PBB, Bank Dunia, dan lainnya) yang menyusun, dan dapat menyesuaikan, indikator untuk memenuhi standar perbandingan internasional. Untuk indikator lainnya, data disediakan oleh peneliti pasar (Gallup), LSM independen (Center for Reproductive Rights, Freedom House, ILGA, Open Data Watch, World Justice Project), peneliti akademis (Notre Dame-Gain, Varieties of Democracy), dan organisasi lain yang melakukan penelitian (World Economic Forum).

Tabel Lampiran.

Indikator indeks, target, dan sumber data

REFERENSI	NAMA INDIKATOR	TARGET	SUMBER DATA
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 1			
1.1	Rasio jumlah penduduk miskin sebesar $3,65 per hari pada PPP tahun 2017 (% dari populasi)	angka 0	Bank Dunia
1.2	Rasio gabungan populasi pemuda (0–19 tahun) dan senior (65+ tahun) terhadap populasi wanita usia kerja (20–64 tahun)	Skor terbaik = 100	Divisi Populasi PBB/DESA
1.3	Sejauh mana hukum memberikan akses yang sama dan aman bagi perempuan dan laki-laki terhadap penggunaan, pengendalian dan kepemilikan lahan	Skor terbaik = 100	Perempuan, Bisnis dan Hukum/ Bank Dunia
1.4	Proporsi perempuan (15+ tahun) yang melaporkan merasa nyaman dengan pendapatan rumah tangga mereka	100	Gallup

REFERENSI	NAMA INDIKATOR	TARGET	SUMBER DATA
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2			
2.1	Proporsi penduduk yang konsumsi energi makanannya berada di bawah tingkat minimum	angka 0	Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO)
2.2	Ketidakamanan pangan pada perempuan, berdasarkan Skala Pengalaman Ketidakamanan Pangan (FIES) yang dilaporkan sendiri	angka 0	Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO)
2.3	Prevalensi anemia pada wanita tidak hamil (usia 15–49 tahun)	angka 0	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
2.4	Proporsi perempuan (15+ tahun) yang melaporkan memiliki cukup uang untuk membeli makanan yang mereka atau keluarga mereka butuhkan dalam 12 bulan terakhir	100	Gallup
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 3			
3.1	Rasio kematian ibu (kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup)	angka 0	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
3.2	Angka kesuburan remaja (kelahiran per 1.000 perempuan berusia 15–19 tahun)	angka 0	Divisi Populasi PBB/DESA
3.3	Persentase perempuan usia subur (15–49 tahun) yang telah memenuhi kebutuhan keluarga berencana dengan metode modern	100	Divisi Populasi PBB/DESA
3.4	Proporsi perempuan (usia 15+ tahun) yang melaporkan bahwa mereka puas dengan kualitas layanan kesehatan di wilayah mereka	100	Gallup
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4			
4.1	Persentase anak perempuan (setahun sebelum usia sekolah dasar resmi) yang terdaftar di pendidikan pra-sekolah	100	UNESCO
4.2	Jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak perempuan yang memasuki sekolah selama hidupnya	17 tahun	Program Pembangunan PBB (UNDP)
4.3	Proporsi perempuan muda (usia 15–24 tahun) yang tidak menempuh pendidikan, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	angka 0	Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
4.4	Persentase perempuan (25+ tahun) yang memiliki setidaknya pendidikan menengah	100	Program Pembangunan PBB (UNDP)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 5			
5.1	Persentase perempuan muda (usia 15–19 tahun) yang telah menikah	angka 0	Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)
5.2	Persentase perempuan (usia 15+ tahun) yang melaporkan bahwa, jika dalam kesulitan, mereka memiliki saudara atau teman yang dapat mereka andalkan untuk membantu mereka	100	Gallup
5.3	Sejauh mana terdapat dasar hukum untuk melakukan aborsi	Skor terbaik = 100	Pusat Hak Reproduksi
5.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen nasional	Keseimbangan (45–55%)	Persatuan Parlementer Internasional (IPU)
5.5	Persentase jabatan menteri/senior pemerintahan yang dipegang oleh perempuan	Keseimbangan (45–55%)	Persatuan Parlementer Internasional (IPU)

REFERENSI	NAMA INDIKATOR	TARGET	SUMBER DATA
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 6	**Air Bersih dan Sanitasi**		
6.1	Proporsi penduduk yang menggunakan setidaknya layanan air minum dasar	100	JMP WHO/UNICEF
6.2	Proporsi penduduk yang menggunakan setidaknya layanan sanitasi dasar	100	JMP WHO/UNICEF
6.3	Proporsi perempuan (usia 15+ tahun) yang melaporkan bahwa mereka puas dengan kualitas air di tempat tinggal mereka	100	Gallup
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 7	**Energi Terjangkau dan Bersih**		
7.1	Proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap listrik	100	Bank Dunia
7.2	Proporsi penduduk yang mengandalkan bahan bakar dan teknologi bersih	100	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
7.3	Proporsi perempuan (15+ tahun) yang melaporkan bahwa mereka puas dengan kualitas udara di tempat tinggal mereka	100	Gallup
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 8	**Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**		
8.1	Kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang serupa	Paritas (1)	Forum Ekonomi Dunia (WEF)
8.2	Proporsi perempuan yang diakui sebagai "pekerja keluarga yang berkontribusi" sebagai % dari total pekerjaan untuk pekerjaan perempuan	Skor terbaik = 100	Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
8.3	Ruang lingkup kebebasan berserikat dan hak tawar-menawar kolektif dalam hukum	Skor terbaik = 0	Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
8.4	Sejauh mana negara memiliki undang-undang yang mewajibkan kesetaraan peran dan pengasuhan perempuan?	Skor terbaik = 100	Perempuan, Bisnis dan Hukum/ Bank Dunia
8.5	Proporsi perempuan yang memiliki rekening bank di lembaga keuangan	100	Bank Dunia
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 9	**Industri, Inovasi dan Infrastruktur**		
9.1	Proporsi perempuan yang telah melakukan atau menerima pembayaran digital dalam satu tahun terakhir	100	Bank Dunia
9.2	Proporsi perempuan (15+ tahun) yang melaporkan bahwa mereka puas dengan kualitas jalan di tempat tinggal mereka	100	Gallup
9.3	Proporsi perempuan yang memiliki akses terhadap layanan internet	100	Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU)
9.4	Nilai tambah manufaktur dalam dolar AS konstan tahun 2015 sebagai proporsi PDB (%)	Skor terbaik = 30	UNIDO melalui UNSD
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 10	**Mengurangi Ketimpangan**		
10.1	Rasio ketimpangan Palma, yaitu pembagian pendapatan 10% penduduk terkaya dengan pendapatan 40% penduduk termiskin.	Keseimbangan (0,97-1,03)	Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNU-WIDER)
10.2	Tingkat otonomi pribadi, hak individu dan kebebasan dari diskriminasi	Skor terbaik = 16	Rumah Kebebasan
10.3	Persentase instrumen hak asasi manusia utama yang diratifikasi terkait migrasi	Maksimum perjanjian = 21	Pengumpulan Perjanjian PBB (UNTC), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Organisasi untuk Migrasi (IOM)

REFERENSI	NAMA INDIKATOR	TARGET	SUMBER DATA
10.4	Sejauh mana perempuan dapat secara terbuka mendiskusikan isu politik di ruang privat dan publik	Skor terbaik = 4	Ragam Demokrasi (V-DEM)
10.5	Sejauh mana undang-undang mengkriminalisasi, melindungi atau mengakui orientasi seksual, identifikasi gender (SOGI) dan hubungan sesama jenis	Skor terbaik = 0	Asosiasi Lesbian, Gay, Biseksual, Trans, dan Interseks Internasional (ILGA)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 11	**Kota dan Komunitas Berkelanjutan**		
11.1	Proporsi perempuan (usia 15+ tahun) yang melaporkan memiliki cukup uang untuk menyediakan tempat tinggal atau perumahan yang layak dalam 12 bulan terakhir	100	Gallup
11.2	Emisi gas rumah kaca dari	angka 0	Badan Energi Internasional (IEA)
11.3	Persentase perempuan (15+ tahun) yang melaporkan bahwa mereka puas dengan transportasi umum di daerah mereka	100	Gallup
11.4	Kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi diukur berdasarkan indeks kinerja logistik	Skor terbaik = 5	Bank Dunia
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 13	**Aksi Iklim**		
13.1	Sejauh mana delegasi yang mewakili negara pada pertemuan COP memiliki keseimbangan gender	Keseimbangan (45-55%)	Organisasi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Perempuan (WEDO)
13.2	Persentase perempuan (usia 15+ tahun) yang upaya pelestarian lingkungan	100	Gallup
13.3	Tingkat kerentanan iklim	Skor terbaik = 0	Indeks Adaptasi Global Notre Dame (ND-GAIN)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 16	**Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Kuat**		
16.1	Sejauh mana perempuan memiliki akses yang aman, setara dan efektif terhadap keadilan	Skor terbaik = 4	Ragam Demokrasi (V-DEM)
16.2	Perempuan korban pembunuhan berencana (per 100.000 penduduk perempuan)	angka 0	Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC)
16.3	Persentase perempuan (usia 15+ tahun) yang melaporkan bahwa mereka merasa aman berjalan sendirian di malam hari di kota atau daerah tempat tinggal mereka	100	Gallup
16.4	Fungsi Sistem Peradilan Pidana - Sub-indeks Indeks Negara Hukum	Skor terbaik = 1	Proyek Keadilan Dunia (WJP)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 17	**Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**		
17.1	Pengeluaran militer sebagai persentase PDB (%)	angka 0	Bank Dunia
17.2	Utang pemerintah pusat sebagai persentase PDB (%)	angka 0	Dana Moneter Internasional (IMF)
17.3	Proporsi perempuan (usia 15+ tahun) yang melaporkan bahwa korupsi pemerintah tidak tersebar luas di negara tempat mereka tinggal	angka 0	Gallup
17.4	Cakupan dan disagregasi indikator - subindeks dari Indeks Keterbukaan Statistik	Skor terbaik = 100	Pengawasan Data Terbuka

Ucapan Terima Kasih

Desain Indeks Gender SDG Equal Measures 2030 (EM2030) 2024 dipimpin oleh Albert Motivans, bersama Aurélie Acoca. Indeks ini sangat bergantung pada masukan dan panduan dari anggota koalisi EM2030, serta dari para pendukung gender dan pakar pengukuran dari seluruh dunia. EM2030 mengucapkan terima kasih kepada Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards di Joint Research Centre (JRC-COIN) Komisi Eropa atas panduan dan dukungan mereka serta atas pelaksanaan audit teknis formal terhadap Indeks dan metodologinya.

Laporan ini ditulis oleh Amanda Austin dan Alison Holder, dengan kontribusi dari Aarushi Khanna, Gabrielle Leite, Marisa Miodosky, Albert Motivans, dan Julisa Tambunan. Data dan analisis untuk laporan ini dipimpin oleh Albert Motivans, dengan Aurélie Acoca, Alison Holder, Gabrielle Leite, dan Marisa Miodosky. Laporan ini disunting oleh Tom Burgess. Laporan ini dirancang oleh The TOM Agency, dengan kepemimpinan kreatif dari Aminah Jasho dan Esme Abbott. Ilustrasi diproduksi oleh Sua Balac. Manajemen proyek dipimpin oleh Sinéad Nolan.

Panduan dan masukan dari anggota koalisi EM2030, khususnya Kelompok Kerja Indeks dan Advokasi & Komunikasi, sangat penting dalam pembuatan laporan ini.

Selama penyusunan laporan ini, anggota dan penasihat tim Sekretariat EM2030 memberikan kepemimpinan, dukungan, dan masukan, termasuk: Esme Abbott, Aurélie Acoca, Tity Agbahey, Amanda Austin, Paula Becerra, Cecilia García, Alison Holder, Aminah Jasho, Coretta Jonah, Aarushi Khanna, Amanda Kobeissi, Gabrielle Leite, Alison Livingstone, Hamid Mahamat, Charlotte Minvielle, Marisa Miodosky, Albert Motivans, Donnelly Mwachi, Sinéad Nolan, Safourata Sidibé, Julisa Tambunan, dan Carol Wambui.

Penerjemahan disediakan oleh Émilie Brochard (Prancis) dan Maitén Vargas serta Erika Cosenza (Spanyol) dengan penyuntingan oleh Safourata Sidibé (Prancis) dan Cecilia García (Spanyol).

Penafian

Pandangan yang diungkapkan dalam laporan ini tidak selalu mewakili pandangan masing-masing anggota koalisi EM2030 atau Sekretariat EM2030 (proyek yang disponsori secara fiskal oleh Panorama Global). Penelitian dan temuan yang tercakup dalam laporan ini (termasuk lampiran dan lampiran) telah disiapkan untuk penggunaan dan manfaat eksklusif dan diyakini akurat. Materi ini hanya dimaksudkan sebagai informasi dan panduan umum.

Tentang EM2030:

Equal Measures 2030 merupakan koalisi pemimpin nasional dan internasional dari jaringan feminis, masyarakat sipil, dan pembangunan internasional. Kami menghubungkan data dan bukti dengan advokasi dan tindakan tentang kesetaraan gender, untuk mengubah kehidupan perempuan dan anak perempuan serta mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Koalisi saat ini merupakan upaya bersama dari:

Jaringan Pengembangan dan Komunikasi Perempuan Afrika (FEMNET) (wilayah Afrika)

Pusat Sumber Daya dan Penelitian Wanita Asia-Pasifik (ARROW) (wilayah Asia)

Asociación Generando Equidad, Liderazgo y Oportunidades - ASOGEN (Guatemala)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM (wilayah LAC)

Data2X (Global)

GROOTS (Kenya)

KAPAL Perempuan (Indonesia)

La Ruta Pacífica de las Mujeres (Kolombia)

Rencana Internasional (Global)

Réseau Siggil Jigéen - RSJ (Senegal)

Masyarakat Alternatif Kesehatan - SAHAJ (India)

Perempuan Berhasil (Global)

Pembaca didorong untuk mereproduksi materi dari publikasi EM2030 untuk keluaran mereka sendiri, tetapi kami mohon pengakuan yang sepantasnya.

Untuk penggunaan daring, kami meminta para pembaca untuk memberikan tautan ke laporan di situs web EM2030, tempat Anda dapat menjelajahi data dan mengunduh perangkat kami untuk dibagikan secara luas: *equalmeasures2030.org* .

Untuk pengakuan tertulis, kami sarankan kutipan berikut:

EM2030.*Masa depan yang setara gender sedang dalam krisis? Temuan dari Indeks Gender SDG 2024*(Seattle: Ukuran yang Setara 2030, 2024).

EQUAL MEASURES 2030

Hubungi kami:

Ukuran yang Sama 2030
(proyek yang disponsori secara fiskal oleh Panorama Global) 2101 4th Ave, Ste 2100 Seattle, WA 98121 USA

Kunjungi kamisitus web .

Jelajahi Pusat Indeks Gender SDG 2024 dengan lebih banyak data, wawasan, dan alat advokasi:

equalmeasures2030.org/2024-sdg-gender-index

X &Instagram
@sama2030

LinkedIn &Indonesia
@Ukuran yang Setara 2030

Kirim email ke kami di:alamat email:
equalmeasures2030.org Daftar untuk kamibuletin .